







**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN  
INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2025**



 (0275) 321629  
 [bappedalitbang@purworejo.go.id](mailto:bappedalitbang@purworejo.go.id)  
 [bappedalitbang.purworejokab.go.id](http://bappedalitbang.purworejokab.go.id)  
 Jl. Urip Sumoharjo No. 46 Purworejo

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP Bapperida Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sekaligus sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo selama Tahun 2025, yang mencakup capaian sasaran strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset, Dan Inovasi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Bapperida Kabupaten Purworejo ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan sebagai bahan informasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel di Kabupaten Purworejo.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Purworejo

  
Drs. Hery Raharjo, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691225 199001 1 001

PARAF HIERARKI	
Plt. Sekretaris	
Perencana	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP Bapperida Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sekaligus sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo selama Tahun 2025, yang mencakup capaian sasaran strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset, Dan Inovasi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Bapperida Kabupaten Purworejo ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan sebagai bahan informasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel di Kabupaten Purworejo.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Purworejo



Drs. Hery Raharjo, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691225 199001 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman

**KATA PENGATAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.	Profil Organisasi.....	3
	1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
	1.3.2. Sumber Daya Manusia .....	6
	1.3.3. Sumber Daya Anggaran .....	8
1.4.	Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	10
	1.4.1. Aspek Strategis.....	10
	1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	11
1.5.	Sistematika Penulisan.....	12

**BAB II PERENCANAAN KINERJA.....** 14

2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD.....	14
2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan 2025 .....	16
	2.2.1. Strategi.....	18
	2.2.2. Arah Kebijakan .....	19
2.3.	Struktur Program Tahun 2025.....	19
2.4.	Perjanjian Kinerja tahun 2025 .....	21
2.5.	Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024.....	22
2.6.	Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	23

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....** 29

3.1.	Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	29
	3.1.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	29
	3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir .....	32
	3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	34
	3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.....	35

3.1.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	35
3.1.6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
3.1.7.	Analisis Program Dan Sub Kegiatan.....	39
3.2.	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	54
3.3.	Inovasi.....	54
3.4.	Penghargaan.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	57
4.1.	Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	57
4.2.	Rencana Tindak Lanjut.....	58

## DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	1.1	Komposisi Pegawai Bapperida Kabupaten Purworejo...	8
Tabel	1.2	Alokasi Anggaran Belanja Bapperida Kab.Purworejo Tahun 2025 .....	9
Tabel	1.3	Uraian Alokasi Anggaran Belanja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	10
Tabel	2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapperida Kab Purworejo.....	15
Tabel	2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bapperida Kabupaten Purworejo.....	16
Tabel	2.3	Struktur Program Kegiatan Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 .....	20
Tabel	2.4	Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo .....	21
Tabel	2.5	Saran atau Rekomendasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Bapperida Kab.Purworejo Tahun 2025 .....	22
Tabel	3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	29
Tabel	3.2	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	30
Tabel	3.3	Target dan Realisasi Bapperida Kab.Purworejo Tahun 2025.....	31
Tabel	3.4	Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 .....	33
Tabel	3.5	Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik .....	40
Tabel	3.6	Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas .....	44
Tabel	3.7	Capaian Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatkan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan .....	51
Tabel	3.8	Realisasi Anggaran Bapperida Kab.Purworejo Tahun 2025 .....	54

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo....	5
Gambar 2.1	Website dan PPID Bapperida Kabupaten Purworejo	24
Gambar 2.2	Aplikasi SAWIJI .....	24
Gambar 2.3	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) .....	25
Gambar 2.4	SIPD Bangda (Kementerian Dalam Negeri) .....	24
Gambar 2.5	Aplikasi e-Kinerja BKN .....	26
Gambar 2.6	Website ESR Kementerian PANRB (esr.menpan.go.id)	26
Gambar 2.7	Aplikasi SUPRISE .....	27
Gambar 2.8	Aplikasi SIMKEUDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) .....	27
Gaambar 2.9	Aplikasi SIPD Penatausahaan .....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Referensi
- Lampiran 2. SK Tim Penyusun LKJIP 2025
- Lampiran 3. SK Penetapan LKJIP
- Lampiran 4. PK PD Murni dan Perubahan
- Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD
- Lampiran 6. SK IKU PD
- Lampiran 7. Hasil SKM Tahun 2025
- Lampiran 8. Hasil Realisasi Fisik Dan Keuangan Program, Kegiatan, Subkegiatan
- Lampiran 9. Penghargaan dan Dokumentasi Penghargaan yang Diterima PD

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Ridset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Bapperida tahun 2025. Badan Perencanaan Pembangunan Ridset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 3(tiga) target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	83,2	85,5	102
2.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	94	99,9	106
3.	Meningkatnya Jumlah Diseminasi Hasil Penelitian/Pengembangan	Peningkatan jumlah penelitian/penge mbangan yang disampaikan kepada masyarakat	Persen	94	100	106

Kinerja keuangan Bapperida Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 6.297.732.178,- atau 91,78 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 6.862.080.165

Capaian kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal Tahun Anggaran 2025. LKjIP disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penggunaan sumber daya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026.

Penyusunan LKjIP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Kepala Bapperida dengan Bupati Purworejo, sehingga dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya selama Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025 merupakan bagian dari tahapan akhir pelaksanaan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026 yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026. Oleh karena itu, LKjIP Tahun 2025 memiliki peran strategis tidak hanya sebagai laporan kinerja tahunan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan arah kebijakan, program, dan kegiatan Bapperida dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah jangka menengah.

Sebagai perangkat daerah yang mengampu fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah, Bapperida Kabupaten Purworejo dituntut untuk menjamin kualitas perencanaan

pembangunan, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, serta efektivitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat menyajikan gambaran kinerja yang objektif, terukur, dan akuntabel mengenai capaian kinerja Bapperida selama Tahun 2025, sekaligus mengidentifikasi permasalahan, tantangan, serta peluang perbaikan sebagai dasar peningkatan kinerja secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya LKjIP Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Selain itu, LKjIP ini juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKjIP Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah untuk menyajikan informasi kinerja secara sistematis, terukur, dan berorientasi hasil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Purworejo selaku pemberi mandat atas capaian kinerja Bapperida selama Tahun 2025.
2. Menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja strategis Bapperida Kabupaten Purworejo yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
4. Mendukung peningkatan implementasi dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.

5. Mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan berbasis kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida.

### 1.3. Profil Organisasi

Bapperida Kabupaten Purworejo merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi daerah. Fungsi tersebut menjadi landasan utama Bapperida dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, serta indikator kinerja perangkat daerah.

Sebagai institusi perencana pembangunan dan penggerak riset serta inovasi daerah, Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah disusun secara terintegrasi, konsisten, dan berbasis data serta hasil riset. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan lintas sektor, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, serta fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Purworejo berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perpres 78 Tahun 2021, Permendagri 07 Tahun 2023, Perda SOTK Kabupaten Purworejo 03 Tahun 2024, serta Perbup SOTK 73 Tahun 2024. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam penetapan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta penyelenggaraan perencanaan kinerja Bapperida agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo. Perubahan nomenklatur tersebut merupakan tindak lanjut dari penyesuaian kebijakan nasional dan daerah dalam rangka penguatan peran perencanaan pembangunan yang terintegrasi

dengan riset dan inovasi daerah, serta penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan nomenklatur dimaksud bersifat administratif dan kelembagaan, tanpa mengubah substansi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah. Dengan demikian, seluruh tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026 tetap dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Bapperida Kabupaten Purworejo hingga akhir periode perencanaan.

Sehubungan dengan perubahan nomenklatur tersebut, maka dalam penyusunan LKjIP Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 ini digunakan nomenklatur Bapperida Kabupaten Purworejo, sementara acuan dokumen perencanaan jangka menengah masih merujuk pada Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026. Penyesuaian nomenklatur ini tidak mempengaruhi proses pengukuran maupun capaian kinerja Tahun 2025, serta tidak mengganggu kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

### **1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2024, Bapperida Kabupaten Purworejo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **a. Tugas**

Bapperida Kabupaten Purworejo bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

#### **b. Fungsi**

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah yang menjadi dasar penetapan sasaran dan indikator kinerja;
2. Pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah;

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah sebagai dasar pengukuran capaian kinerja;
4. Penyelenggaraan administrasi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

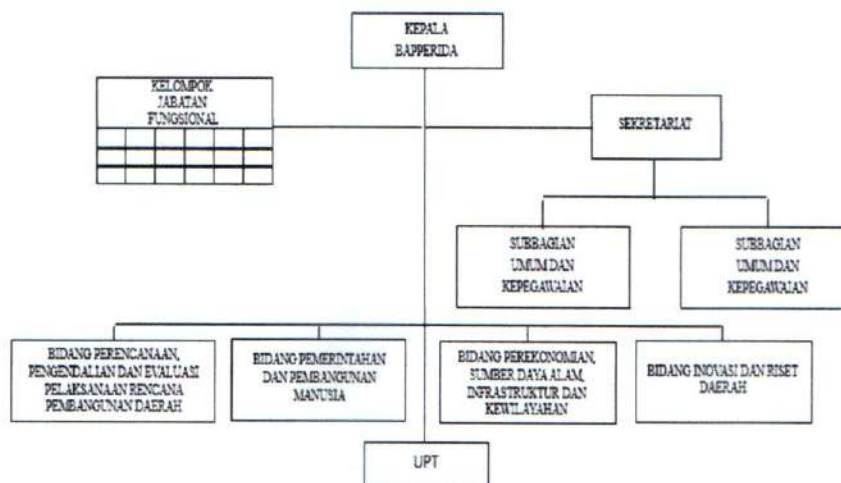
c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo terdiri dari :

1. Kepala Bapperida;
2. Sekretariat;
  - a. Sekretariat terdiri dari 1 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
4. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi Bapperida Kab Purworejo



### 1.3.2. Sumber Daya Manusia

Kondisi kepegawaian pada Bapperida Kabupaten Purworejo menunjukkan komposisi sumber daya manusia yang relatif proporsional dengan tugas dan fungsi kelembagaan. Terdapat 30 orang pegawai yang tersebar di lima bidang, yaitu Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat sebanyak 10 orang, disusul oleh Bidang Perencanaan sebanyak 7 orang, sedangkan bidang lainnya masing-masing memiliki antara 4–5 orang pegawai. Secara umum, jumlah pegawai ini masih terbatas, namun sudah mampu mendukung pelaksanaan fungsi strategis perencanaan, evaluasi, serta riset dan inovasi daerah.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, sebanyak 10 orang (33%) pegawai berpendidikan S2, menunjukkan kapasitas akademik yang memadai dalam mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Sebanyak 9 orang (30%) berpendidikan S1, yang berperan penting dalam pelaksanaan teknis dan penyusunan dokumen perencanaan. Pegawai berpendidikan D3 berjumlah 4 orang (13%), dengan fungsi utama mendukung operasional teknis dan administrasi, sedangkan pegawai dengan pendidikan SMA berjumlah 7 orang (23%) dan berperan dalam pelayanan umum serta dukungan administratif. Proporsi ini menunjukkan bahwa kompetensi akademik Bapperida tergolong kuat, meskipun masih terdapat ketergantungan terhadap tenaga administrasi non-akademik tinggi.

Dari sisi jenis kelamin, terdapat 13 orang laki-laki (43%) dan 17 orang perempuan (57%). Distribusi ini menunjukkan keterlibatan perempuan yang cukup dominan, khususnya pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta Bidang SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan. Sementara itu, Sekretariat lebih banyak diisi oleh pegawai laki-laki, dan Bidang Perencanaan relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Bapperida untuk mewujudkan tata kelola dan

perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Jika dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, mayoritas pegawai berada pada Golongan III sebanyak 17 orang (57%), yang umumnya menduduki posisi fungsional dan pelaksana teknis dengan kompetensi profesional. Selanjutnya, Golongan IV berjumlah 8 orang (27%), didominasi oleh pejabat dengan pengalaman dan peran strategis dalam pengambilan keputusan. Pegawai Golongan II berjumlah 4 orang (13%), sebagian besar mendukung pekerjaan teknis dan administratif. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur kepegawaian Bapperida solid di level menengah dan atas, mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta riset dan inovasi daerah.

Berdasarkan jabatan dan eselon, Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki struktur organisasi yang lengkap mulai dari pimpinan hingga staf pendukung. Terdapat 1 orang pejabat eselon II sebagai pimpinan tertinggi, didukung oleh 5 orang pejabat eselon III yang memimpin masing-masing bidang. Saat ini tidak terdapat pejabat eselon IV, sejalan dengan restrukturisasi birokrasi yang mendorong perampingan jabatan struktural. Dari sisi jabatan fungsional, terdapat 15 orang pejabat fungsional tertentu (JFT) sebagai pelaksana teknis utama, terutama di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi. Selain itu, terdapat 9 staf pelaksana administrasi yang memastikan kelancaran operasional sehari-hari. Komposisi ini mencerminkan keseimbangan antara peran strategis, teknis, dan administratif, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Secara umum, struktur SDM Bapperida Kabupaten Purworejo didominasi oleh tenaga profesional berpendidikan tinggi dengan pengalaman kerja memadai. Hal ini menjadi potensi besar dalam mendorong transformasi kelembagaan menuju tata kelola perencanaan dan riset yang lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif di masa mendatang. Kondisi kepegawaian tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 1.1.  
Komposisi Pegawai Bapperida Kab Purworejo

No	Bidang	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Golongan			Eselon/Jabatan					Jlh
		S2	S1	D3	SMA	L	P	II	III	IV	II	III	IV	JFT	STAF	
1	Sekretariat	3	2	1	4	7	3	3	4	3	1	1		2	6	10
2	Rendalenre nbanda	3	2	1	1	3	3		4	3		1		5	1	7
3	PPM	1	3		1	1	4		4	1		1		3	1	5
4	SDAIK	2	2			0	4		3			1		3		4
5	RIDA	1		2	1	2	3	1	2	1		1		2	1	4
Jumlah		10	9	4	7	13	17	4	17	8	1	5	0	15	9	
Persentase		33 %	30 %	13 %	23%	43 %	57 %	13 %	57 %	27 %						30

### 1.3.3. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran Bapperida Kabupaten Purworejo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang meliputi:

- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan manajemen risiko daerah
- Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Analisis dan pemanfaatan data pembangunan daerah
- Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yaitu Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yaitu Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA
- Kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yaitu Koordinasi pelaksanaan sinergitas

dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- g. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yaitu Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah Bidang
- h. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yaitu Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan
- i. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yaitu Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah Bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- j. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Inovasi, Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah, Lomba Inovasi Daerah melalui Innovative Government Award (IGA), Pelaksanaan Lomba Kreativitas Inovasi Masyarakat (Krenova) Kabupaten, Pengembangan Sistem Informasi Untuk Riset, Pengembangan Riset dan Inovasi daerah (Surprise), Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi, Dukungan Layanan Sistem Inovasi Daerah, , Penyusunan Analisis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Penerbitan Jurnal Integral, Penyusunan Policy Brief, Koordinasi Forum Komunikasi Riset dan Inovasi, Koordinasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Tabel 1.2.  
Alokasi Anggaran Belanja  
Bapperida Kab Purworejo Tahun 2025

NO	URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN TA 2025 (Rp)
I	Belanja Operasi	
1	Belanja Pegawai	3.891.766.349
2	Belanja Barang dan Jasa	2.970.313.816
	Jumlah Belanja Operasi	6.862.080.165
II	Belanja Modal	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0
	Jumlah Belanja Modal	0
	JUMLAH BELANJA (I+II)	6.862.080.165

Sumber: DPA Bapperida TA 2025.

Penggunaan/pengalokasian anggaran Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.  
Uraian Alokasi Anggaran Belanja  
Bapperida Kab Purworejo Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	561.132.400
2.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	67.905.500
3.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	118.424.600
4.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	197.011.900
5.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	143.622.400
6.	Kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	283.966.500
7.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	170.270.000
8.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	88.443.100
9.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	353.772.400
10.	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	257.572.100
11.	Dukungan administrasi umum, administrasi kepegawaian, gaji pegawai, dll)	4.619.959.265
	Jumlah	6.862.080.165

#### 1.4. Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

##### 1.4.1. Aspek Strategis

Aspek strategis Bapperida Kabupaten Purworejo ditetapkan berdasarkan mandat RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026, khususnya dalam mendukung Misi ke-4 yaitu meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta hasil evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2025. Dengan dan sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah mencapai 85,5 dari target 83,2 atau sebesar 102%, yang menunjukkan bahwa pelayanan publik Bapperida telah berjalan dengan baik dan melampaui target kinerja. Aspek ini menjadi strategis karena Bapperida berperan sebagai perangkat daerah yang memberikan layanan koordinasi, fasilitasi, dan

asistensi perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah lain serta pemangku kepentingan pembangunan.

2. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel. Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 sebesar 99,97% dari target 94% (106%) menunjukkan peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan ketepatan waktu penyusunannya. Namun demikian, capaian Nilai SAKIP sebesar 65,58 dari target 68 (96%) mengindikasikan bahwa penguatan integrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja masih menjadi aspek strategis yang perlu ditingkatkan untuk mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
3. Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah dalam proses perencanaan pembangunan. Pada Tahun 2025, tingkat pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan yang dijadikan rekomendasi dalam dokumen perencanaan mencapai 44% dari target 35,8% (122%), serta peningkatan jumlah diseminasi hasil penelitian/pengembangan kepada masyarakat mencapai 100% dari target 94% (106%). Aspek ini menjadi strategis karena riset dan inovasi merupakan instrumen penting dalam mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis data, *evidence-based policy*, dan inovatif.

#### **1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berdasarkan aspek strategis tersebut serta hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, isu strategis Bapperida Kabupaten Purworejo dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan berbasis teknologi informasi. Meskipun capaian IKM telah melampaui target, tuntutan masyarakat dan perangkat daerah terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi semakin meningkat, sehingga diperlukan inovasi layanan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran. Capaian nilai SAKIP yang belum sepenuhnya memenuhi target menunjukkan masih perlunya penguatan

keterkaitan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kinerja yang berorientasi hasil (*outcome*).

3. Belum meratanya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah. Walaupun capaian pemanfaatan riset dan diseminasi hasil penelitian menunjukkan kinerja yang sangat baik, tantangan yang dihadapi adalah memastikan hasil penelitian dan inovasi dapat diimplementasikan secara lebih luas, aplikatif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

LKJIP Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Profil Organisasi
  - 1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi
  - 1.3.2. Sumber Daya Manusia
  - 1.3.3. Sumber Daya Anggaran
- 1.4. Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 1.4.1. Aspek Strategis
  - 1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD
- 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 2025
  - 2.2.1. Strategi
  - 2.2.2. Arah Kebijakan
- 2.3. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
- 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.5. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024
- 2.6. Instrument Pendukung Capaian Kinerja

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025
  - 3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

- 3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
  - 3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
  - 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
  - 3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
  - 3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - 3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025
  - 3.3. Inovasi
  - 3.4. Penghargaan

#### BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja
- 4.2. Rencana Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan LKjIP Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026 sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah perangkat daerah. Renstra tersebut memuat gambaran kondisi dan permasalahan pembangunan, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan, serta indikasi program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah.

Renstra Bapperida disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026, sehingga penyusunan LKjIP Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menjadi bagian dari proses pengukuran kinerja pada tahapan akhir pelaksanaan RPJMD dan Renstra. Selain itu, LKjIP juga menjadi instrumen evaluasi atas konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

#### **2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo dalam Renstra Tahun 2021–2026 diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik perangkat daerah.
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
3. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja utama yang meliputi:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP)
- Persentase pemanfaatan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan

Target kinerja indikator tersebut ditetapkan hingga akhir periode Renstra Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapperida Kab Purworejo

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Base line	Target Kinerja Tujuan/Sasaran PD (%)				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,3	82,5	82,8	83	83,2	83,5
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,3	82,5	82,8	83	83,2	83,5
Perencanaan Pembangunan yang berkualitas		NILAI SAKIP	-	-	65,0 0	67,0 0	68,0 0	70,00
	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	-	92,0 0 %	93,0 0 %	94,0 0 %	95,00 %
Pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan dalam dokumen perencanaan		Hasil penelitian atau pengembangan yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan rencana pembangunan	22,0 0%	25,0 0%	28,1 0%	33,4 2%	35,0 0%	35,8 %
	Meningkatnya Jumlah Diseminasi hasil Penelitian / Pengembangan	Peningkatan jumlah penelitian atau pengembangan yang disampaikan pada masyarakat	87,0 0%	91,1 0%	92,0 0%	93,3 %	94%	94,44 %

Sumber: Renstra Bapperida Tahun 2022-2026 (Perubahan Ketiga)

Tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 disusun secara konsisten dan berjenjang dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Setiap indikator kinerja dirumuskan untuk mengukur pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida serta ditetapkan dengan mempertimbangkan

capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra Tahun 2026.

Penetapan target kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari tahapan akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026 sehingga target yang ditetapkan bersifat realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan dalam LKJIP ini tidak hanya menggambarkan output kegiatan tetapi juga mencerminkan kontribusi Bapperida terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025

Sejalan dengan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026, yaitu:

“Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)”,

Bapperida Kabupaten Purworejo merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapperida memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bapperida Kabupaten Purworejo disajikan secara sistematis pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
Bapperida Kab Purworejo

Visi “Purworejo Berdaya Saing 2025”			
MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Perencanaan Pembangunan yang	Mewujudkan perencanaan pembangunan	Mewujudkan peningkatan kualitas dokumen	Meningkatkan peran dan sinergitas

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
berkualitas	yang berkualitas	perencanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas data dan pengendalian evaluasi	pemangku kepentingan
			Peningkatan Kualitas data sesuai dengan kebutuhan perencanaan
			Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan reliabilitas data serta pelaporan
		Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan dalam dokumen perencanaan	Meningkatnya Jumlah Diseminasi hasil Penelitian/ Pengembangan	Peningkatan jumlah penelitian pengembangan untuk kebutuhan perencanaan	Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk Policy Brief Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk Policy Brief Bidang Sosial dan

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
			Kependudukan
			Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk Policy Brief Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			Meningkatkan Publikasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian
Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Mewujudkan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui penyelenggaraan Perencanaan, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian	Meningkatkan layanan administrasi urusan penunjang perangkat daerah meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi umum dan keuangan, pengadaan dan pemeliharaan BMD, serta penyediaan jasa penunjang perangkat daerah

### 2.2.1. Strategi

Strategi Bapperida Kabupaten Purworejo diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah melalui:

- a) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan;
- b) Koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi
- c) Peningkatan jumlah penelitian pengembangan untuk kebutuhan perencanaan
- d) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian

### 2.2.2. Arah Kebijakan

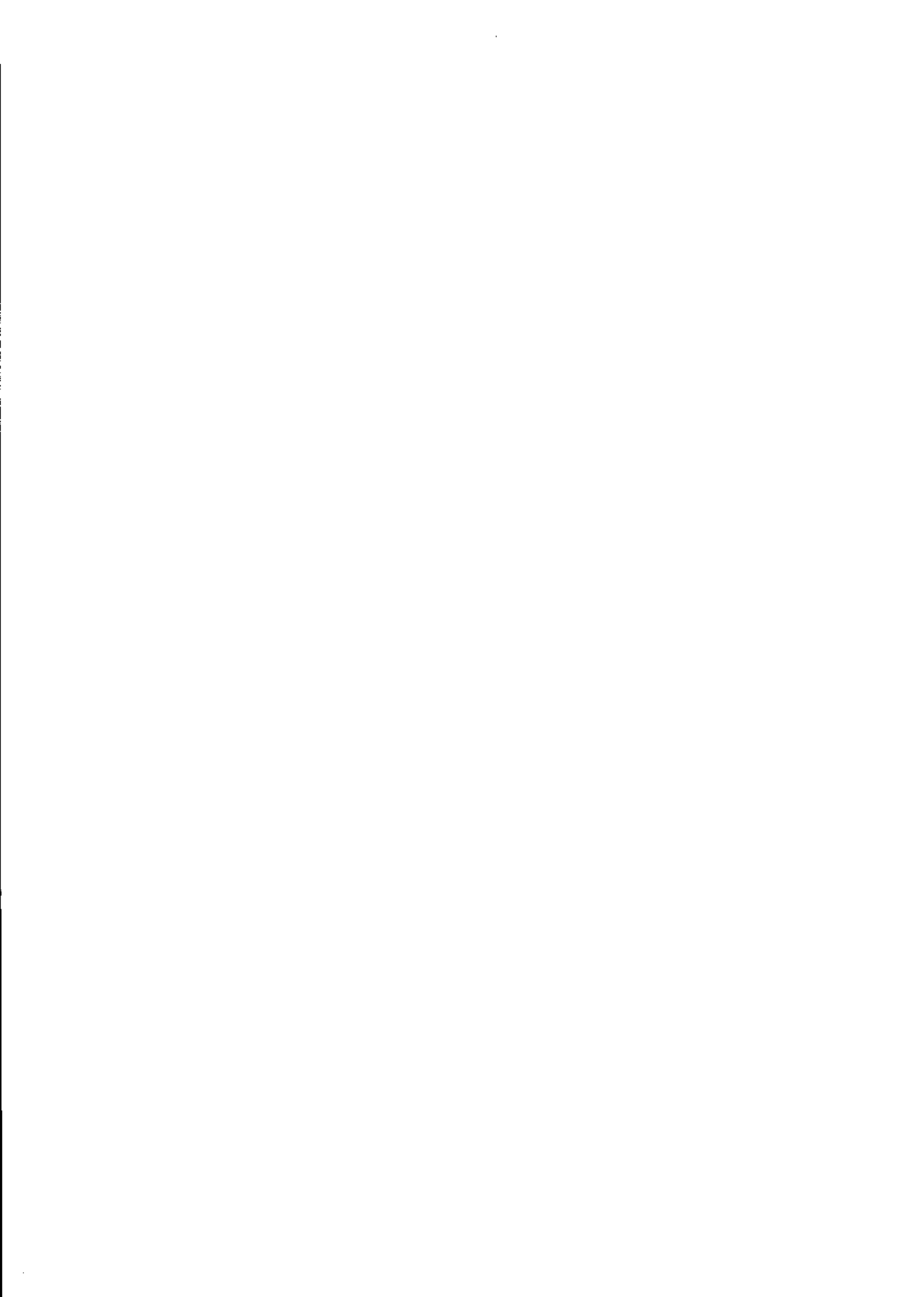
Arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 difokuskan pada:

- a) Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- b) Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui peningkatan validitas dan reliabilitas data serta pelaporan pembangunan secara terintegrasi.
- d) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pada berbagai bidang pembangunan, meliputi:
  - 1) bidang pembangunan manusi;
  - 2) bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA);
  - 3) bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- e) Meningkatkan inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk policy brief pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- f) Meningkatkan inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk policy brief guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan berbasis eviden (evidence-based policy).

Strategi dan arah kebijakan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Purworejo.

### 2.3. Struktur Program Tahun 2025

Struktur program Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah secara efektif dan efisien.



Program yang dilaksanakan terdiri atas:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Struktur program tersebut dirancang untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, baik melalui penyediaan dukungan administratif, pelaksanaan perencanaan pembangunan, koordinasi lintas sektor, maupun penguatan fungsi penelitian dan inovasi daerah. Rincian struktur program dan pagu anggaran Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.  
Struktur Program Bapperida Kab Purworejo Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target 2025	
1	2	3	4	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.619.959.265	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	747.462.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat waktu	100%
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	624.600.800	Persentase Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	870.057.600	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %

Keterkaitan antara program, kegiatan, dan indikator kinerja menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja sehingga realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat

diukur kontribusinya terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Bapperida Kabupaten Purworejo.

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 merupakan komitmen antara Kepala Bapperida Kabupaten Purworejo dengan Bupati Purworejo atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja tahunan yang harus dicapai oleh perangkat daerah. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta menjadi acuan dalam penyusunan LKjIP.

Sasaran strategis dan indikator kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.4, sedangkan alokasi anggaran program yang mendukung pencapaian sasaran kinerja tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.4.  
Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83,2%
2.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP)	94
3.	Meningkatnya Jumlah Diseminasi hasil Penelitian/ Pengembangan	Peningkatan Jumlah Penelitian atau Pengembangan yang Disampaikan pada Masyarakat	94 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.619.959.265	APBD KABUPATEN
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	747.462.500	APBD KABUPATEN
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	624.600.800	APBD KABUPATEN
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	870.057.600	APBD KABUPATEN
	JUMLAH	6.862.080.165	

Dengan adanya Perjanjian Kinerja, keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dapat diwujudkan secara konsisten dan akuntabel.

## 2.5. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi LKJIP Tahun 2024 merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo. Rekomendasi tersebut antara lain berkaitan dengan penguatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, serta penguatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

Bapperida Kabupaten Purworejo telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui berbagai langkah perbaikan, antara lain pelaksanaan rapat koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, serta penyempurnaan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah. Rincian saran atau rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.  
Saran atau Rekomendasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja  
Bapperida Kab Purworejo Tahun 2025

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Ket
1	Perlunya penguatan komitmen bersama seluruh unsur Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.	Melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah melalui rapat teknis dan forum perencanaan untuk memastikan keselarasan dokumen perencanaan.	Sudah Ditindaklanjuti
2	Perlunya menjaga keberlanjutan perencanaan dengan meminimalisir pergantian personil perencanaan OPD.	Mendorong penetapan personil perencana OPD yang berkesinambungan serta peningkatan kapasitas SDM perencana.	Sudah Ditindaklanjuti
3	Perlunya peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan perangkat daerah.	Peningkatan kualitas Musrenbang, forum konsultasi publik, dan pelibatan pemangku kepentingan secara lebih proaktif.	Sudah Ditindaklanjuti

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Ket
4	Perlunya penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh Perangkat Daerah.	Pengembangan dan optimalisasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan pemanfaatannya oleh OPD.	Sudah Ditindaklanjuti
5	Perlunya penguatan koordinasi antar pihak terkait perencanaan pembangunan daerah.	Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah melalui rapat koordinasi dan forum teknis.	Sudah Ditindaklanjuti
6	Perlunya reviu tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Perangkat Daerah agar lebih terukur.	Melakukan reviu dan penyempurnaan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Perangkat Daerah (Bidang terkait).	Sudah Ditindaklanjuti

Pelaksanaan tindak lanjut ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran dan target kinerja Tahun 2025 serta mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

## 2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, Bapperida Kabupaten Purworejo memanfaatkan berbagai sistem informasi berbasis teknologi sebagai instrumen pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pemanfaatan sistem informasi tersebut merupakan bagian dari implementasi e-Government yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses kerja birokrasi, memperkuat integrasi data pembangunan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Instrumen pendukung capaian kinerja yang digunakan oleh Bapperida Kabupaten Purworejo antara lain meliputi:

### 1. Website dan PPID Bapperida Kabupaten Purworejo

Website resmi Bapperida Kabupaten Purworejo dimanfaatkan sebagai media penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi, publikasi kegiatan, serta layanan informasi publik. Website ini terintegrasi dengan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sarana penyampaian informasi publik guna

mendukung keterbukaan informasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Gambar 2.1.

### Website dan PPID Bapperida Kab Purworejo



### 2. Aplikasi SAWIJI (Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi)

Dalam mendukung pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, Bapperida Kabupaten Purworejo menggunakan aplikasi SAWIJI yang memuat menu monitoring dan evaluasi pembangunan (monevbang), monitoring dan evaluasi pengendalian (monevdal), serta e-SAKIP. Aplikasi ini menjadi instrumen utama dalam pemantauan capaian kinerja program dan kegiatan secara terintegrasi.

Gambar 2.2.  
Aplikasi SAWIJI



### 3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI)

Bapperida Kabupaten Purworejo memanfaatkan SIPD RI sebagai sistem nasional dalam penyusunan, sinkronisasi, dan pengendalian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pemanfaatan SIPD RI mendukung keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Gambar 2.3.  
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia  
(SIPD RI)



#### 4. SIPD Bangda (Kementerian Dalam Negeri)

Dalam mendukung sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, Bapperida Kabupaten Purworejo memanfaatkan SIPD Bangda sebagai instrumen fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam memastikan kesesuaian substansi dokumen perencanaan daerah.

Gambar 2.4.

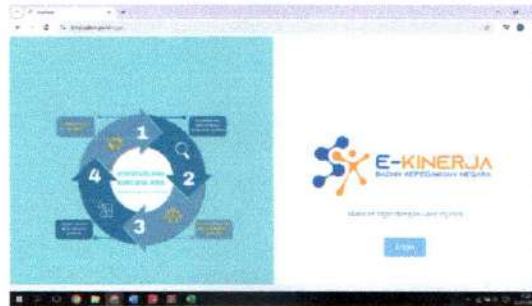
#### SIPD Bangda (Kementerian Dalam Negeri)



#### 5. Aplikasi e-Kinerja BKN

Untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara periodik, Bapperida Kabupaten Purworejo menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN sebagai instrumen penilaian kinerja individu aparatur. Aplikasi ini berfungsi sebagai parameter pengukuran kinerja pegawai sekaligus bukti dukung kontribusi setiap aparatur dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Gambar 2.5.  
Aplikasi e-Kinerja BKN



6. Website ESR Kementerian PANRB ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id))

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Bapperida Kabupaten Purworejo berpartisipasi dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui website ESR Kementerian PANRB. Sistem ini digunakan sebagai instrumen evaluasi eksternal atas kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Gambar 2.6.  
Website ESR Kementerian PANRB ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id))



7. Sistem Informasi Riset, Pengembangan Riset, dan Inovasi Daerah

Untuk memperkuat fungsi riset dan inovasi daerah, Bapperida Kabupaten Purworejo memanfaatkan Sistem Informasi Riset, Pengembangan Riset, dan Inovasi Daerah sebagai sarana pengelolaan data riset dan inovasi, diseminasi hasil riset, serta pemantauan perkembangan inovasi perangkat daerah dan masyarakat. Sistem ini mendukung penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data dan eviden (*evidence-based policy*).

Gambar 2.7.  
Aplikasi SURPRISE  
(Sistem Informasi Riset, Pengembangan Riset, dan Inovasi Daerah)



1. Aplikasi SIMKEUDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah)

Dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bapperida Kabupaten Purworejo memanfaatkan data dan informasi yang dihasilkan dari aplikasi SIMKEUDA sebagai rujukan dalam pemantauan realisasi keuangan program dan kegiatan. Informasi dari SIMKEUDA digunakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi keuangan dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah.

Gambar 2.8.  
Aplikasi SIMKEUDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah)



2. Aplikasi SIPD Penatausahaan

Selain itu, Bapperida Kabupaten Purworejo memanfaatkan data dan informasi dari aplikasi SIPD Penatausahaan sebagai instrumen pendukung dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, khususnya untuk memastikan keterkaitan antara realisasi keuangan dan capaian kinerja program dan kegiatan.

Gambar 2.9.  
Aplikasi SIPD Penatausahaan



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Analisis Capaian Kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Capaian kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir tahun anggaran.

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Pada Tahun 2025 Bapperida Kabupaten Purworejo menetapkan tiga sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

##### 3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025..

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2.  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian
2	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Capaian Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah tepat waktu dan Dokumen Perencanaan	Penjumlahan Capaian Indikator Program Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula
			Perangkat Daerah yang berkualitas	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dibagi 2
3	Meningkatnya Jumlah Diseminasi Hasil Penelitian /Pengembangan	Peningkatan Jumlah Penelitian atau Pengembangan yang Disampaikan pada Masyarakat	Peningkatan jumlah penelitian atau pengembangan yang disampaikan pada masyarakat	jumlah kajian atau penelitian yang dilakukan oleh Bapperida ditambah hasil lomba krenova ditambah Lembaga atau masyarakat yang dokumen hasil kajian atau penelitiannya disampaikan ke Bapperida Dibagi keseluruhan kajian atau penelitian yang direncanakan

Hasil pengukuran capaian kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

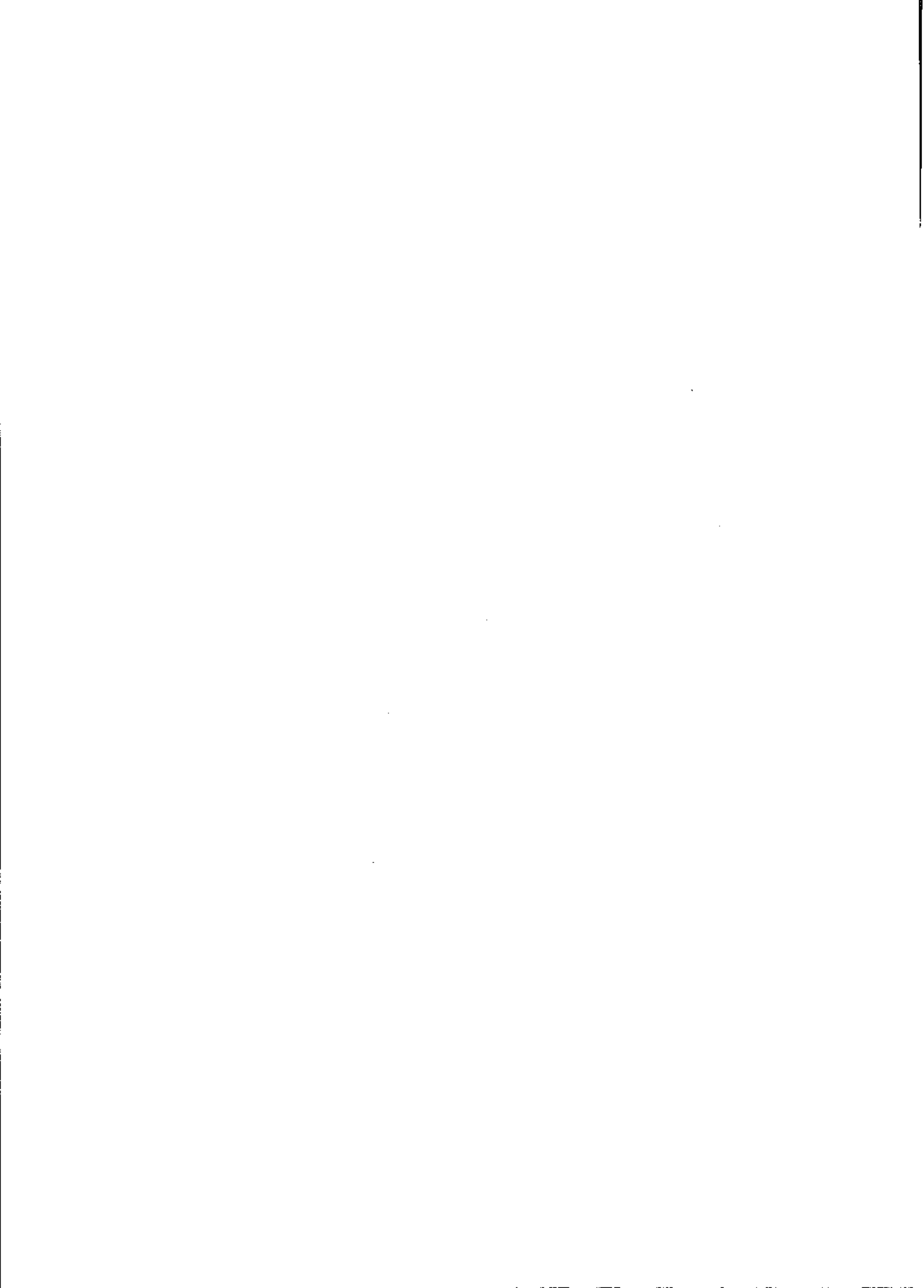
Tabel 3.3.  
Target dan Realisasi Bapperida Kab Purworejo Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83,5	83,2	85,5	102%
2	Indeks Perencanaan Pembangunan	93	94	99.97	106%
3	Peningkatan Jumlah Penelitian/Pengembangan yang Disampaikan pada Masyarakat	100%	94%	100%	106%

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa secara umum seluruh indikator kinerja mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

a. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perangkat daerah.



Target akhir RPJMD untuk indikator IKM ditetapkan sebesar 83,5, sedangkan realisasi kinerja pada Tahun 2025 mencapai 85,5. Dengan demikian tingkat capaian kinerja mencapai 102%, yang menunjukkan bahwa target jangka menengah telah terlampaui sebelum berakhirnya periode RPJMD.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Bapperida Kabupaten Purworejo telah berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan secara berkelanjutan.

b. Sasaran Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas

Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu dan Berkualitas. Target akhir RPJMD ditetapkan sebesar 100%, sedangkan realisasi pada Tahun 2025 mencapai 99,97%. Dengan capaian tersebut, tingkat keberhasilan kinerja mencapai 99,97%, yang menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah telah berjalan secara optimal.

Capaian ini mencerminkan semakin meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk konsistensi antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen perencanaan tahunan serta keselarasan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

c. Sasaran Meningkatnya Jumlah Diseminasi Hasil Penelitian/Pengembangan

Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Hasil Penelitian atau Pengembangan yang Disampaikan kepada Masyarakat. Target akhir RPJMD ditetapkan sebesar 94%, sedangkan realisasi kinerja pada Tahun 2025 mencapai 100%, sehingga tingkat capaian mencapai 106%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya diseminasi hasil penelitian dan pengembangan telah berjalan secara optimal serta mampu meningkatkan pemanfaatan hasil

kajian dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah.

### 3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja organisasi dari waktu ke waktu.

Tabel 3.4.  
Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target				Realisasi				Target Akhir RPJMD	% Realisasi 2025 & Target Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah	indeks	82,3	82,5	82,8	83	83,2	83	83	85	85,5	83,50	102%
2	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%			93%	99,97%	100%	99,97%
3	Meningkatnya Jumlah Diseminasi Hasil Penelitian / Pengembangan	Peningkatan jumlah penelitian atau pengembangan yang disampaikan pada masyarakat	%	87%	91%	92%	93%	94%	91,10%	92,85%	100%	100%	94%	106%

a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Menunjukkan realisasi kinerja sebesar 85,5, melampaui target akhir RPJMD sebesar 83,5. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Bapperida telah berada di atas standar yang direncanakan.

a. Sasaran Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas

Menunjukkan capaian sebesar 99,97%, yang sangat mendekati target maksimal sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah telah berjalan secara efektif.

b. Sasaran Meningkatnya Jumlah Diseminasi Hasil Penelitian/Pengembangan

Menunjukkan realisasi sebesar 100%, melampaui target

akhir RPJMD sebesar 94%. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya peran Bapperida dalam mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi dalam proses pembangunan daerah. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

### **3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD dan Renstra), realisasi kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo sampai dengan Tahun 2025 secara umum telah mencapai bahkan melampaui target akhir yang ditetapkan.

- a. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**  
Target akhir RPJMD untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan sebesar 83,5. Realisasi kinerja Tahun 2025 yang mencapai 85,5 menunjukkan bahwa target jangka menengah telah terlampaui sebelum berakhirnya periode RPJMD. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan Bapperida telah berada di atas standar yang direncanakan, serta mencerminkan efektivitas kebijakan peningkatan layanan yang telah dilaksanakan.
- b. **Sasaran Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas**  
Target jangka menengah ditetapkan sebesar 100 persen. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 telah mencapai 100%, sehingga sasaran strategis ini dapat dinyatakan telah tercapai secara optimal. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang dikembangkan oleh Bapperida telah berjalan secara efektif dan mampu memastikan penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu dan berkualitas.
- c. **Sasaran Meningkatnya Jumlah Diseminasi Hasil Penelitian/Pengembangan**  
Target akhir RPJMD ditetapkan sebesar 94%. Realisasi kinerja Tahun 2025 yang mencapai 100% menunjukkan bahwa target jangka menengah telah terlampaui secara

signifikan. Kondisi ini mencerminkan semakin kuatnya peran Bapperida dalam mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

#### **3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Bapperida merupakan perangkat daerah dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan sehingga tidak secara langsung menyelenggarakan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Meskipun demikian, kinerja Bapperida secara tidak langsung mendukung pencapaian SPM melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

#### **3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

##### **a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bapperida Kabupaten Purworejo. Pada Tahun 2025 nilai IKM mencapai 85,5, melampaui target akhir RPJMD sebesar 83,50. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Bapperida Kabupaten Purworejo telah berjalan dengan baik serta mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Penilaian IKM didasarkan pada 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa capaian nilai IKM terutama didukung oleh beberapa unsur utama, yaitu perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, serta kejelasan prosedur pelayanan yang semakin mudah dipahami oleh masyarakat.

- Faktor Pendorong

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perbaikan prosedur pelayanan yang semakin sederhana dan transparan, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan yang mendukung kelancaran proses pelayanan. Selain itu, komitmen pimpinan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

- Faktor Penghambat

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kualitas pelayanan, terutama terkait dengan waktu penyelesaian pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih memadai, serta sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang perlu terus disempurnakan.

- Upaya Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada periode berikutnya, Bapperida Kabupaten Purworejo akan melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain melalui peningkatan standar pelayanan, penguatan kapasitas aparatur pelayanan, optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan, serta penguatan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat melalui pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik.

b. Sasaran Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas

Capaian indikator pada sasaran mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas pada Tahun 2025 mencapai 99,97%, mendekati target maksimal sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah

telah dilaksanakan secara lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis data.

Selisih sebesar 0,03% dari target yang telah ditetapkan disebabkan oleh masih adanya sebagian kecil dokumen perencanaan yang memerlukan penyempurnaan administratif dan penyesuaian substansi, khususnya terkait harmonisasi indikator kinerja serta keterkaitan antara program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

- Faktor Pendorong

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh semakin baiknya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Selain itu, peningkatan kualitas data pembangunan daerah serta penguatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan turut mendukung terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas.

- Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan ketersediaan data yang terintegrasi secara optimal antar perangkat daerah serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan penyusunan perencanaan berbasis kinerja.

- Upaya Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pada periode mendatang, Bapperida Kabupaten Purworejo akan terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar perangkat daerah, meningkatkan kualitas data pembangunan daerah melalui penguatan sistem pengelolaan data

sektoral, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja dan berbasis data.

c. Sasaran Meningkatnya Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator pada sasaran meningkatnya diseminasi hasil penelitian dan pengembangan pada Tahun 2025 mencapai 100%, melampaui target akhir RPJMD sebesar 94%. Capaian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Purworejo telah mulai dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

- Faktor Pendorong

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya inisiatif dalam pelaksanaan penelitian dan pengkajian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, serta meningkatnya upaya diseminasi hasil penelitian melalui berbagai media publikasi dan forum koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

- Faktor Penghambat

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain masih terbatasnya pemanfaatan hasil penelitian secara optimal dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah, serta perlunya peningkatan kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.

- Upaya Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pada periode berikutnya, Bapperida Kabupaten Purworejo akan memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dalam pemanfaatan hasil penelitian, meningkatkan kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, serta meningkatkan diseminasi hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah maupun policy

brief sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

### **3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada Tahun 2025 Bapperida Kabupaten Purworejo mengelola anggaran sebesar Rp 6.862.080.165,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.297.732.178,00 atau sebesar 91,77% dari total pagu anggaran yang ditetapkan. Sementara itu, capaian kinerja terhadap sasaran strategis secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapperida Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena dengan tingkat realisasi anggaran yang tidak mencapai 100%, perangkat daerah tetap mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi penggunaan anggaran ini antara lain dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan sumber daya internal, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah, serta penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Selain itu, efisiensi anggaran juga dipengaruhi oleh adanya penghematan pada beberapa komponen belanja operasional, seperti belanja perjalanan dinas, belanja kegiatan rapat, serta belanja operasional lainnya yang dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan sistem koordinasi daring dan integrasi sistem informasi perencanaan. Kebijakan efisiensi tersebut tidak berdampak pada penurunan kualitas kinerja, namun justru mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

### **3.1.7. Analisis Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Pencapaian sasaran strategis Bapperida Kabupaten Purworejo didukung oleh pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Tabel 3.5.  
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	12 Paket	12 Paket	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100 Jenis	100 Jenis	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	1 Unit	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	100%

- d. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Pada Tahun 2025 nilai IKM mencapai 85,5, melampaui target yang ditetapkan sebesar 83,2 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 102,76%.

Tabel 3.6.  
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat waktu	100%	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	160 Usulan	160 Usulan	100%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM D/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan	Dokumen Analisis Data dan Informasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	1 Masukan	100%
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	123 Orang	123 Orang	100%
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	100%
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	0 Kerja Sama	0 Kerja Sama	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100%
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%	100%	100%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Berkualitas	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Berkualitas	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Daerah Bidang Perekonomian	Renstra/Renja Bidang Perekonomian			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah Berkualitas	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100%

- e. Sasaran mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas diukur melalui indikator persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang tepat waktu dan berkualitas. Pada Tahun 2025 capaian indikator ini mencapai 99,97%, yang menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah telah berjalan secara optimal.

Tabel 3.7.  
 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap  
 Sasaran Meningkatnya Diseminasi Hasil Penelitian dan  
 Pengembangan

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %	100 %	100%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang	Dokumen Penelitian dan Pengembangan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Program	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Ekonomi dan Pembangun an	gan Bidang Ekonomi dan Pembangun an			
	Penelitian dan Pengemban gan Perindustria n dan Perdaganga n	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengemban gan Perindustria n dan Perdaganga n	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penelitian dan Pengemban gan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengemban gan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penelitian dan Pengemban gan Perhubung an	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengemban gan Perhubung an	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penelitian dan Pengemban gan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengemban gan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengemban gan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Pengemban gan Inovasi dan Teknologi	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Penelitian, Pengemban gan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengemban gan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Program	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	100%

- f. Sasaran meningkatnya diseminasi hasil penelitian dan pengembangan diukur melalui indikator persentase hasil penelitian yang disampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Pada Tahun 2025 capaian indikator ini mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 94% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 106%.

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis Bapperida Kabupaten Purworejo.

### 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 digunakan untuk mendukung pelaksanaan empat program utama yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Rincian realisasi anggaran per program disajikan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.8.

Realisasi Anggaran Bapperida Kab Purworejo Tahun 2025

No	Uraian Urusan,Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		% Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.619.959.265	4.093.018.653	88,59%
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	747.462.500	739.531.800	98,94%
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	624.600.800	619.880.765	99,24%
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	870.057.600	845.572.960	97,19%

### 3.3. Inovasi

Dalam mendukung kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo diterapkan beberapa inovasi antara lain SAWIJI dan SURPRISE:

#### 1. Inovasi SAWIJI

SAWIJI merupakan Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja pembangunan daerah dalam satu platform digital.

Melalui sistem ini, proses monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan transparan.

Gambar 3.1.  
Inovasi SAWIJI



## 2. Inovasi SURPRISE adalah Sistem untuk Riset Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah

SURPRISE merupakan Sistem Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah yang berfungsi sebagai basis data riset dan inovasi daerah sekaligus sebagai platform kompetisi inovasi masyarakat dan perangkat daerah.

Sistem ini mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi yang mendukung pembangunan daerah.

Gambar 3.2.  
Inovasi SURPRISE



### 3.4. Penghargaan

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil meraih Innovative Government Award (IGA) 2025 dengan kategori Kabupaten Sangat Inovatif.

Capaian tersebut merupakan keberhasilan kedua secara berturut-turut setelah penghargaan yang sama diperoleh pada Tahun 2024. Keberhasilan ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong penguatan ekosistem inovasi serta implementasi kebijakan pembangunan berbasis inovasi.

Indikator utama yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah Indeks Inovasi Daerah (IID) yang menunjukkan peningkatan signifikan dari 48 pada Tahun 2023 menjadi 61,72 pada Tahun 2024, dan pada Tahun 2025 diproyeksikan mencapai lebih dari 65,1.

Gambar 3.3.  
Penghargaan IGA Kabupaten Purworejo



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja**

LKJIP Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Bapperida dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, riset, dan inovasi, serta menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian tersebut juga mencerminkan perkembangan kinerja Bapperida dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya melalui pengukuran indikator kinerja utama (IKU).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Bapperida Kabupaten Purworejo menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) indikator kinerja utama. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja menunjukkan bahwa seluruh sasaran strategis tersebut dapat dicapai dengan tingkat realisasi indikator kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, secara umum capaian kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 berada pada kategori "Sangat Baik".

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan, keterlibatan aktif seluruh aparatur, serta sinergi dan koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh perencanaan yang baik serta mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang berjalan secara konsisten turut mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari aspek pengelolaan keuangan, kinerja anggaran Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp6.297.732.178,00 atau 91,78% dari total pagu anggaran sebesar Rp6.862.080.165,00. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik serta didukung oleh pemanfaatan anggaran yang cukup efektif dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Meskipun secara umum capaian kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, masih terdapat ruang perbaikan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara lebih optimal.

#### 4.2. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025 serta dengan memperhatikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terdapat beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pada tahun berikutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penajaman keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, program, dan kegiatan. Bapperida Kabupaten Purworejo perlu memastikan bahwa seluruh indikator kinerja utama telah memenuhi prinsip SMART serta memiliki definisi operasional, metode pengukuran, sumber data, dan frekuensi pengukuran yang jelas. Tindak lanjut dilakukan melalui penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, reviu Perjanjian Kinerja secara berkala, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu perencanaan dan kinerja.
2. Pengukuran dan evaluasi kinerja perlu lebih diarahkan tidak hanya pada capaian output, tetapi juga pada *outcome* dan manfaat pembangunan. Bapperida Kabupaten Purworejo perlu mendorong pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan kebijakan pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik, pemanfaatan aplikasi kinerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan evaluasi.
3. Penerapan penganggaran berbasis kinerja perlu dilakukan secara lebih konsisten sehingga alokasi anggaran benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tindak lanjut dilakukan melalui penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas analisis efisiensi dan efektivitas anggaran, serta pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan.

4. Bapperida Kabupaten Purworejo perlu mendorong agar hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Tindak lanjut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, peningkatan diseminasi hasil riset dan inovasi, serta pengembangan sistem informasi riset dan inovasi daerah.

Bapperida Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Purworejo, Februari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Purworejo

  
Drs. Hery Raharjo, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691225 199001 1 001

PARAF HIERARKI	
Plt. Sekretaris	
Perencana	

4. Bapperida Kabupaten Purworejo perlu mendorong agar hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Tindak lanjut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, peningkatan diseminasi hasil riset dan inovasi, serta pengembangan sistem informasi riset dan inovasi daerah.

Bapperida Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Purworejo, Februari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Purworejo



Drs. Heny Raharjo, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691225 199001 1 001

# LAMPIRAN

## DAFTAR REFERENSI

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo;
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/289/2022 tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026;

14. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026;
15. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
16. Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025;
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025;
19. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
20. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025;
21. Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
22. Aplikasi SAWIJI Pemerintah Kabupaten Purworejo (<http://sawiji.purworejokab.go.id>);
23. Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (<https://kinerja.bkn.go.id>);
24. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia;
25. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Urip Sumohardjo Nomor 64 Purworejo Jawa Tengah 54111,  
Telepon (0275) 321629, Faksimile (275) 325546  
Laman bappedalitbang.purworejokab.go.id, Pos-el: bappeda@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 100-33/ 42 /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) TAHUN 2025 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 yang akurat, lengkap, mudah dipahami, dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025.
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEEMPAT** : Tim Penyusunan laporan LKjip pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo, mempunyai Tugas sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja
  2. Mengumpulkan & Menganalisa Data Kinerja
  3. Melakukan Reviu Laporan Kinerja

4. Membandingkan Perencanaan & Hasil
5. Menyusun Laporan Kinerja
6. Mempublikasikan LKjIP

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo,  
Pada tanggal, 31 Desember 2025

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Purworejo



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Hery Raharjo, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691225 199001 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET  
 DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN  
 PURWOREJO  
 NOMOR : 100-3.3/42/2025  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
 INSTANSI PEMERINTAH (LKJIIP) BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET  
 DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN  
 PURWOREJO TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIIP)  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Herry Raharjo.,M.Si	Kepala Bapperida Kab Purworejo	Penanggung Jawab
2	Maria Dini Handajani, s.t., map	Sekretaris Bapperida Kab Purworejo	Ketua
3	Heni Puspitowati, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Sekretaris
4	Wiyandarti, S.IP., M.M.	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia	Anggota
5	Endah Supriyanti, S.Sos., M.Acc.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan	Anggota
6	Sri Palupi, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan	Anggota
7	Anggun Willis Jelita, S.Stp	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Yani Amu, STP, M.Si.	Perencana Ahli Muda	Anggota
9	Marina Safariana, S.Ip.	Perencana Ahli Muda	Anggota
10	Yuni Ermawati, S.Pt.,M.P.	Perencana Ahli Muda	Anggota
11	Fitria Sekar Endah, S.T.	Perencana Ahli Muda	Anggota
12	Aufa Nailulmuna, S.T.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
13	Aini Rahmah, S.T.	Perencana Ahli Pertama	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
14	Fikri Intizhar Rahmatullah, S.Si.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
15	Dina Arifia, S.T.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
16	Rina Wulandari, S.T., M.Urp.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
17	Yusrina Racmawati, S.T.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
18	Muhamad Faisol Reza, A.Md.	Pranata Kompute Mahir	Anggota

Ditetapkan di Purworejo,  
Pada tanggal, 31 Desember 2025

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Purworejo

  
Drs. Hery Raharjo, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691225 199001 1 001

**TAHAPAN PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2025**  
**BAPPERIDA KABUPATEN PURWOREJO**

NO	Agenda	Januari 2026			Februari	
		3	4	5	6	7
1	Persiapan dan Penunjukan Tim					
2	Rapat Koordinasi Tim					
3	Pengumpulan Materi LKjIP					
4	Penyusunan LKjIP					
5	Pembahasan LKjIP dengan Tim					
6	Finalisasi LKjIP					
7	Konsultasi					
8	Hasil Akhir LKjIP					
9	Pengiriman LKjIP					

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Purworejo



Drs. Hery Raharjo, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691225 199001 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET**  
**DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Urip Sumoharjo No. 64 Purworejo 54111, Telp. 0275-321629, Fax. 0275-325546  
laman: [www.bappeda.purworejokab.go.id](http://www.bappeda.purworejokab.go.id), pos-el: [bappeda@purworejokab.go.id](mailto:bappeda@purworejokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. HERY RAHARJO, M.Si..  
Jabatan : Plt. KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN PURWOREJO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULI HASTUTI  
Jabatan : BUPATI PURWOREJO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua

YULI HASTUTI

Pihak Pertama

Drs.HERY RAHARJO, M. Si..  
Pembina Utama Muda  
NIP 19691225 199001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**KABUPATEN PURWOREJO**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN		TARGET
1		2		3
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83,20
2.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	2.	Indek Perencanaan Pembangunan (IPP)	94%
3.	Meningkatnya Jumlah Diseminasi hasil Penelitian / Pengembangan	3.	Peningkatan Jumlah Penelitian atau Pengembangan yang Disampaikan pada Masyarakat	94%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.368.949.786	APBD KABUPATEN
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.121.233.700	APBD KABUPATEN
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.148.599.200	APBD KABUPATEN
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.181.708.400	APBD KABUPATEN
	JUMLAH	7.820.491.086	

Purworejo, 3 Januari 2025

BUPATI PURWOREJO,



YULI HASTUTI

Pit. KEPALA BAPPERIDA  
 KABUPATEN PURWOREJO



Drs. HERY RAHARJO, M. Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP 196912251990011001

**PEMERINTAHAN KAB. PURWOREJO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**



01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.862.080.165,00</b>	<b>6.297.732.178,00</b>	<b>91,77</b>	<b>6.682.742.768,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.862.080.165,00</b>	<b>6.297.732.178,00</b>	<b>91,77</b>	<b>6.646.862.768,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	3.891.766.349,00	3.432.025.361,00	88,18	3.598.903.760,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.580.465.779,00	2.251.795.211,00	87,26	2.349.728.010,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.311.300.570,00	1.180.230.150,00	90,00	1.249.175.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.970.313.816,00	2.865.706.817,00	96,47	3.047.959.008,00
5.1.02.01	Belanja Barang	819.497.200,00	797.135.800,00	97,27	670.400.200,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.361.416.016,00	1.325.207.867,00	97,34	1.406.247.249,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	361.970.000,00	322.627.459,00	89,13	312.890.587,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	380.157.600,00	373.897.691,00	98,35	612.946.972,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47.273.000,00	46.838.000,00	99,07	45.474.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>6.862.080.165,00</b>	<b>6.297.732.178,00</b>	<b>91,77</b>	<b>6.646.862.768,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.880.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	35.880.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	35.880.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.880.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.862.080.165,00</b>	<b>6.297.732.178,00</b>	<b>91,77</b>	<b>6.682.742.768,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(6.862.080.165,00)</b>	<b>(6.297.732.178,00)</b>	<b>91,78</b>	<b>(6.682.742.768,00)</b>

Kab. Purworejo, 2 Februari 2026

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**



Drs. HERY RAHARJO, M.Si.  
NIP.196912251990011001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan. Jendral Urip Sumohardjo 64 Purworejo 54111,

Telepon. 0275-321629, Faks (275) 325546

Laman: [www.bappeda.purworejokab.go.id](http://www.bappeda.purworejokab.go.id), Pos-el: [bappeda@purworejokab.go.id](mailto:bappeda@purworejokab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 100.3.3.y/ 033/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo, diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja utama
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2024 tanggal 03 Juli Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purworejo Nomor 16.18/551/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
NOMOR: 100.3.3.4/033/2024  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(2)	(3)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
2.	Perencanaan Pembangunan Berkualitas		Nilai SAKIP
		Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan
3.	Pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan dalam dokumen perencanaan		Hasil Penelitian atau Pengembangan yang di manfaatkan sebagai dasar perumusan rencana pembangunan
		Meningkatkan Jumlah Desiminasi Hasil Penelitian/Pengembangan	Peningkatan Jumlah Penelitian/Pengembangan yang Disampaikan Masyarakat

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. HERY RAHARJO, M.Si.  
NIP. 19601225 199001 1 001

Keterangan :

\*Diisi definisi Operasional sesuai Keputusan Bupati Purworejo Nomor 16.18/551/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 17 Juni 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO**



**Drs. Hery Ramarjo, M.Si**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 196912251990011001

LAPORAN  
PELAKSANAAN  
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
SEMESTER 2



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2025

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II.....	4
PENGUMPULAN DATA SKM .....	4
2.1 Pelaksana SKM .....	4
2.2 Metode Pengumpulan Data .....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data .....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden .....	6
BAB III.....	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM .....	7
3.1 Jumlah Responden SKM.....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) .....	7
BAB IV .....	9
ANALISIS HASIL SKM.....	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan .	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	10
4.3 Tren Nilai SKM.....	11
BAB V.....	12
KESIMPULAN .....	12
LAMPIRAN.....	13
1. Hasil Pengolahan Data .....	13
2. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya .....	16
3. SK Tim SKM	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No.

14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

#### 1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

## BAB II

### PENGUMPULAN DATA SKM

#### 2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025.

#### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh

pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

### 2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbuan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

### 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo Semester II Tahun 2025 dilaksanakan dalam jangka waktu

6 (enam) bulan, terhitung mulai bulan Juni sampai dengan November 2025. Pelaksanaan survei dilakukan secara berkesinambungan melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis hasil, hingga penyusunan laporan akhir. Setiap tahap dilaksanakan secara sistematis dan terencana agar hasil survei dapat menggambarkan kondisi tingkat kepuasan masyarakat secara akurat, sebagai berikut:

Tahapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juni 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Juli-September 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Oktober 2025	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	November 2025	15

#### 2.5. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung jumlah populasi penerima layanan (pemohon layanan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo. Penetapan populasi dilakukan dengan merujuk pada jumlah pemohon dari seluruh jenis pelayanan berdasarkan data periode survei sebelumnya. Berdasarkan proyeksi jumlah penerima layanan pada tahun 2025, diketahui bahwa total populasi penerima layanan Bapperida dalam kurun waktu satu tahun diperkirakan berjumlah 200 orang.

Untuk menentukan jumlah responden, metode yang digunakan mengacu pada Tabel Penentuan Sampel Krejcie dan Morgan, yang umum digunakan dalam penelitian sosial untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi. Berdasarkan tabel tersebut, untuk populasi sebesar 200 orang, jumlah minimal responden yang diperlukan dalam satu periode pelaksanaan SKM adalah 100 responden.

Pemilihan responden dilakukan secara acak (random sampling) dari setiap jenis layanan yang tersedia di Bapperida, guna memastikan seluruh jenis layanan terwakili dan penilaian yang diberikan mencerminkan persepsi pengguna layanan secara objektif. Dengan demikian, jumlah responden yang ditetapkan telah memenuhi standar minimal serta dianggap memadai untuk menghasilkan gambaran tingkat kepuasan masyarakat yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.



### BAB III

#### HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

##### 1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 100 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	%
1	Jenis kelamin	Laki	57	57%
		Perempuan	43	43%
2	Pendidikan	SD ke bawah		0%
		SLTP		0%
		SLTA	25	25%
		DIII	8	8%
		S1	44	44%
		S2	23	23%
3	Pekerjaan	PNS	28	28%
		TNI	2	2%
		Swasta	2	2%
		Wirausaha	68	68%
		Lainnya	28	28%
4	Jenis layanan	Pelayanan perencanaan sektoral	10	10%
		Pelayanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan berbasis perencanaan	16	16%
		Pelayanan penyelenggaraan data/ statistik	10	10%
		Pelayanan riset dan inovasi	17	17%
		Pelayanan penyusunan produk perencanaan	43	43%
		Lainnya/blank	4	4%

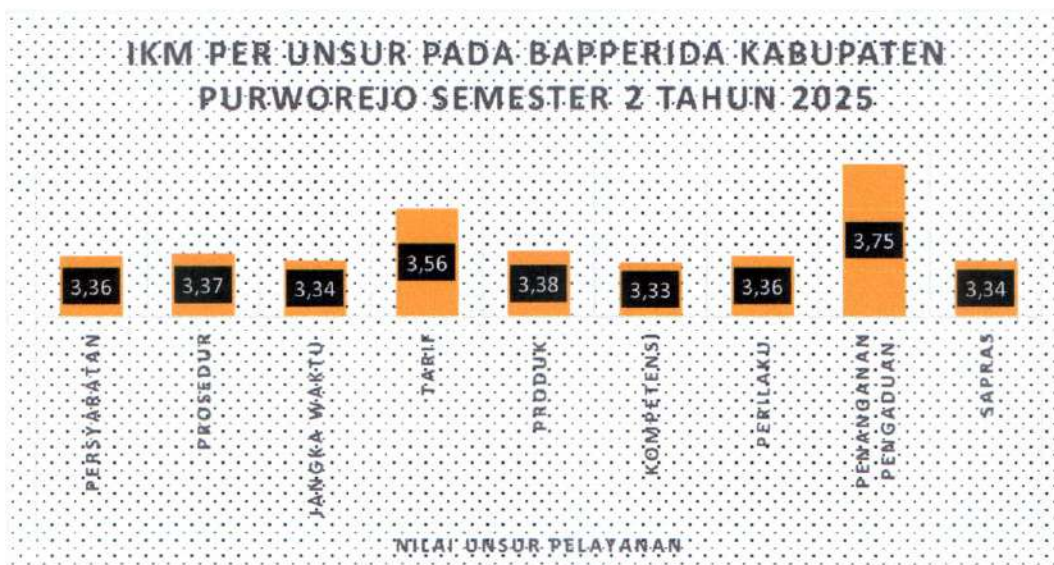
## 1.2 . Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,36	3,37	3,34	3,56	3,38	3,33	3,36	3,75	3,34
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	85,52 (Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



## BAB IV

### ANALISIS HASIL SKM

#### 4.1 . Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025, diperoleh gambaran capaian mutu pelayanan pada sembilan unsur pelayanan dengan rentang nilai 3,33 hingga 3,75. Secara umum, hasil SKM menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berada pada kategori “Baik”, namun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan.

Dari sembilan unsur yang dinilai, terdapat tiga unsur yang memiliki nilai tertinggi. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan memperoleh nilai tertinggi yaitu 3,75. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian pengaduan dan masukan telah berjalan dengan baik dan responsif. Unsur Biaya/Tarif mendapat nilai 3,56, menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat transparan dan tidak memberatkan pengguna layanan karena tidak dipungut biaya. Adapun unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan memperoleh nilai 3,38, yang menunjukkan bahwa jenis layanan, hasil pelayanan, dan output layanan telah sesuai dengan standar serta dipahami oleh pengguna layanan.

Namun demikian, terdapat beberapa unsur layanan yang memperoleh nilai lebih rendah dibanding unsur lainnya sehingga perlu mendapat perhatian. Unsur Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,33, yang menunjukkan bahwa petugas layanan masih memerlukan peningkatan kompetensi teknis dan soft skills, khususnya dalam memberikan pelayanan prima. Sementara itu, unsur Waktu Pelayanan dan Sarana dan Prasarana masing-masing memperoleh nilai 3,34. Temuan ini mengindikasikan bahwa kecepatan penyelesaian layanan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pengguna layanan,

dan fasilitas pendukung pelayanan belum optimal mendukung kenyamanan dan efektivitas proses layanan. Selain itu, unsur Persyaratan (3,36), Perilaku Pelaksana (3,36), dan Prosedur (3,37) juga menunjukkan bahwa meskipun sudah baik, masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek kesederhanaan, keramahan layanan, dan kemudahan prosedur pelayanan.

Sebagai bagian dari analisis kualitatif, masukan masyarakat juga dihimpun dari saran/aduan yang disampaikan melalui kanal pengaduan. Beberapa masukan yang muncul dan menjadi perhatian dalam penyusunan rencana perbaikan layanan antara lain:

1. Harapan agar proses pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tidak memerlukan kedatangan berulang ke kantor.
2. Perlunya peningkatan pemahaman petugas dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan yang lebih komunikatif dan ramah.
3. Kebutuhan untuk meningkatkan penyediaan sarana pendukung layanan, termasuk sistem informasi pelayanan secara digital.

Berdasarkan hasil kuantitatif dan kualitatif tersebut, dapat diidentifikasi kondisi permasalahan utama sebagai berikut:

1. Kecepatan layanan masih dianggap belum optimal, karena sebagian proses pelayanan masih dilakukan secara manual dan belum seluruh pemohon memanfaatkan layanan digital.
2. Kompetensi dan kapasitas petugas layanan masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait pemahaman substansi layanan serta kemampuan komunikasi layanan prima.
3. Sarana dan prasarana layanan masih terbatas, baik dari sisi ruang, fasilitas pendukung, maupun infrastruktur teknologi informasi yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi layanan.

#### 4.2 . Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Bapperida Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa meskipun kinerja pelayanan sudah berada pada kategori memuaskan, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memerlukan peningkatan untuk menjaga kualitas layanan publik, memperkuat budaya pelayanan prima, serta mendorong optimalisasi pengambilan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hasil analisis SKM ini dijadikan dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) perbaikan pelayanan.

Rencana tindak lanjut disusun dengan mempertimbangkan prioritas perbaikan pada unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah dan paling membutuhkan penguatan, terutama terkait Kompetensi Pelaksana, Waktu Pelayanan, serta Sarana dan Prasarana Pelayanan. Selain itu, unsur lain yang meskipun sudah baik tetap diarahkan untuk terus ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

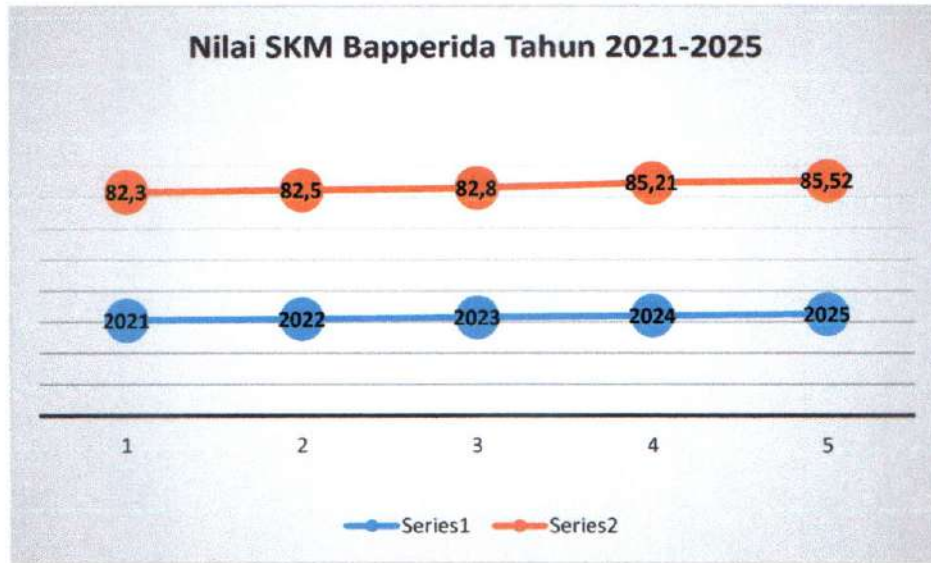
Pembahasan rencana tindak lanjut atas hasil SKM dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 23 Januari 2025 (Berita Acara terlampir). Melalui forum tersebut, disepakati beberapa usulan perbaikan yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek ( $\leq 12$  bulan), jangka menengah ( $> 12-24$  bulan), dan jangka panjang ( $> 24$  bulan). Hasil kesepakatan pemangku kepentingan menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut yang memuat unsur prioritas perbaikan, bentuk program/kegiatan, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab pelaksanaan.

No	Prioritas Unsur Pelayanan	Program/Kegiatan Perbaikan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Kompetensi Pelaksana	Peningkatan kompetensi teknis dan layanan prima bagi petugas pelayanan	Jangka Pendek ( $\leq 12$ bulan)	Sekretariat
2	Waktu Pelayanan	Penyederhanaan SOP layanan	Jangka Pendek–Menengah ( $\leq 18$ bulan)	Sekretariat
3	Sarana dan Prasarana	Peningkatan fasilitas ruang layanan	Jangka Menengah–Panjang ( $> 12-36$ bulan)	Sekretariat
4	Persyaratan & Prosedur Pelayanan	Publikasi prosedur layanan melalui website dan media sosial	Jangka Pendek ( $\leq 12$ bulan)	Sekretariat
5	Perilaku Pelaksana	Pembinaan internal terkait etika pelayanan, komunikasi publik, dan budaya kerja ASN berAKHLAK	Jangka Pendek ( $\leq 12$ bulan)	Sekretariat
6	Penguatan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Monitoring dan evaluasi berkala tindak lanjut pengaduan	Menengah (12–24 bulan)	Sekretariat

#### 4.3 . Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat melalui grafik berikut :

Grafik 1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023-2025



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo.

## BAB V

### KESIMPULAN

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode Juni hingga November 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelayanan publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo secara umum menunjukkan kualitas pelayanan yang *memuaskan*, dengan nilai SKM sebesar 3,41 (kategori B – Baik). Meskipun demikian, hasil SKM tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan pada beberapa aspek tertentu agar kinerja pelayanan semakin optimal dan berdampak luas bagi masyarakat. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan SKM tahun-tahun sebelumnya (2021–2024), nilai SKM Bapperida cenderung stabil dan konsisten berada pada kategori baik, namun belum menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi kepuasan pengguna layanan.
2. Terdapat tiga unsur pelayanan dengan nilai terendah dan menjadi prioritas utama dalam perbaikan pelayanan, yaitu Kompetensi Pelaksana (3,33), Waktu Penyelesaian Pelayanan (3,34), Sarana dan Prasarana Pelayanan (3,34). Ketiga unsur tersebut perlu memperoleh intervensi perbaikan secara terencana melalui peningkatan kapasitas SDM, inovasi pelayanan yang mempercepat proses layanan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang memadai.
3. Unsur pelayanan dengan nilai tertinggi pada SKM 2025 adalah
  - Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan dengan nilai 3,75
  - Biaya/Tarif Pelayanan dengan nilai 3,56
  - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dengan nilai 3,38Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna layanan menilai Bapperida telah memberikan layanan yang transparan, terjangkau,

responsif terhadap pengaduan, serta mampu menyediakan produk pelayanan yang jelas dan sesuai kebutuhan.

Secara umum, meskipun kinerja pelayanan publik telah berada pada kategori baik, namun diperlukan komitmen berkelanjutan, penguatan budaya pelayanan prima, dan inovasi layanan terpadu agar tingkat kepuasan masyarakat dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Purworejo, November 2025

Kepala Bapperida

Kabupaten Purworejo

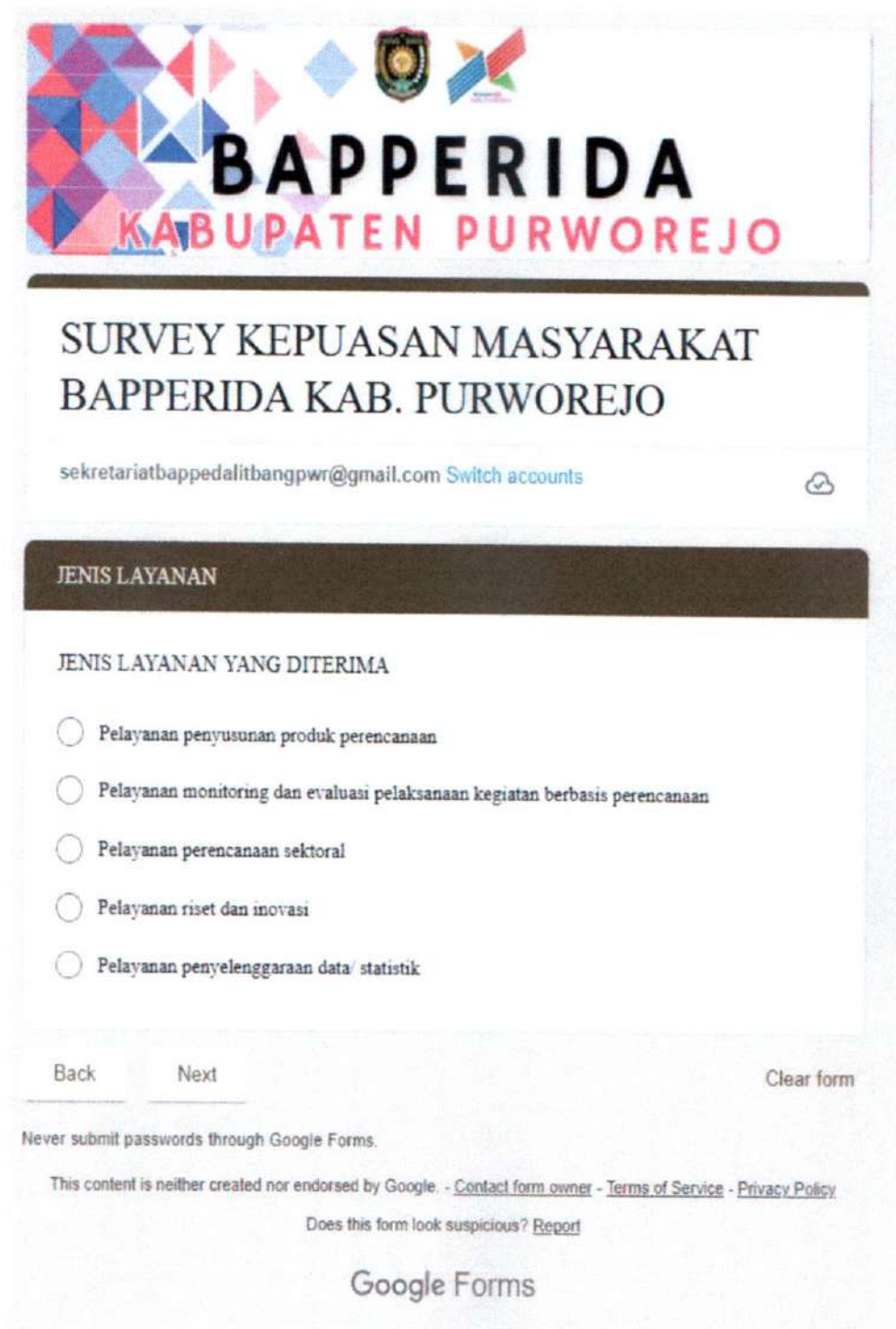


Drs. Herry Raharjo.,M.Si

NIP. 19691225 199001 1 001

## LAMPIRAN

### 1. Kuesioner



The image shows a screenshot of a Google Form. At the top, there is a header with a colorful geometric pattern on the left, the official logo of Kabupaten Purworejo in the center, and a stylized logo on the right. Below this, the text 'BAPPERIDA' is written in large, bold, black letters, with 'KABUPATEN PURWOREJO' in smaller, red letters underneath. A dark brown horizontal bar separates the header from the main content. The main content area has a white background and contains the title 'SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT BAPPERIDA KAB. PURWOREJO' in black, serif font. Below the title, there is a line of text: 'sekretariatbappedalitbangpwr@gmail.com' followed by a blue link 'Switch accounts' and a small cloud icon. Another dark brown horizontal bar is below this. The section title 'JENIS LAYANAN' is written in white on a dark brown background. Underneath, the text 'JENIS LAYANAN YANG DITERIMA' is followed by five radio button options: 'Pelayanan penyusunan produk perencanaan', 'Pelayanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan berbasis perencanaan', 'Pelayanan perencanaan sektoral', 'Pelayanan riset dan inovasi', and 'Pelayanan penyelenggaraan data/statistik'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Back', 'Next', and 'Clear form'. Below the form, there is a warning: 'Never submit passwords through Google Forms.' followed by a disclaimer: 'This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)'. Below that is a link: 'Does this form look suspicious? [Report](#)'. At the very bottom, the 'Google Forms' logo is displayed.



## SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT BAPPERIDA KAB. PURWOREJO

sekretariatbappedalitbangpwr@gmail.com [Switch accounts](#)



### JENIS LAYANAN

#### JENIS LAYANAN YANG DITERIMA

- Pelayanan penyusunan produk perencanaan
- Pelayanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan berbasis perencanaan
- Pelayanan perencanaan sektoral
- Pelayanan riset dan inovasi
- Pelayanan penyelenggaraan data/ statistik

[Back](#)

[Next](#)

[Clear form](#)

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT  
BAPPERIDA KAB. PURWOREJO**

webster1018@ppcbulakarangpurworejo@gmail.com [Send feedback](#)

**1 mandatory required question**

**PERCAYAAN KUSIONER**

1. Bagaimana pendapat saudara tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus pelayanan di unit ini?

- TIDAK JELAS
- KURANG JELAS
- JELAS
- SANGAT JELAS

2. Bagaimana pendapat saudara tentang prosedur pelayanan di unit ini?

- TIDAK JELAS
- KURANG JELAS
- JELAS
- SANGAT JELAS

3. Bagaimana pendapat saudara tentang waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk mengurus pelayanan di unit ini?

- TIDAK CEPAT
- KURANG CEPAT
- CEPAT
- SANGAT CEPAT

4. Bagaimana pendapat saudara tentang biaya yang harus dibayar untuk mengurus pelayanan di unit ini?

- SANGAT MAHAL
- CUKUP MAHAL
- SEDIKIT
- GRATIS

5. Bagaimana pendapat saudara tentang hasil layanan di unit ini?

- TIDAK BERSUTU
- KURANG BERSUTU
- BERSUTU
- SANGAT BERSUTU

6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi pelaksana di unit ini?

- CUKUP KOMPETEN
- KURANG KOMPETEN
- KOMPETEN
- SANGAT KOMPETEN

7. Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku pelaksana dalam memberikan pelayanan di unit ini?

- TIDAK RAMAH
- KURANG RAMAH
- RAMAH
- SANGAT RAMAH

8. Bagaimana pendapat saudara tentang pengamanan pelaksanaan, sarana dan fasilitas bagi pelayanan di unit ini?

- TIDAK ADA
- ADA TETAPI TIDAK BERSUNGGUH
- BERSUNGGUH KURANG MAKSIMAL
- DIRILOLA DENGAN BAIK

9. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana prasarana di unit ini?

- TIDAK BAIK
- KURANG BAIK
- BAIK
- SANGAT BAIK

A copy of your responses will be emailed to the address that you provided.

[Back](#)

[Submit](#)

[Close form](#)

Never stored processed through Google Forms.



This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact your account manager](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

## 2. Hasil Olah Data SKM

**TABULASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
BAPPERIDA KABUPATEN PURWOREJO  
SEMESTER II TAHUN 2025**

No	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	PEREMPUAN	55	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
2	LAKI-LAKI	37	D3	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
3	PEREMPUAN	42	D3	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	PEREMPUAN	52	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	3
5	PEREMPUAN	52	S1	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	3	3	4	3
6	PEREMPUAN	45	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
7	LAKI-LAKI	56	S1	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	LAKI-LAKI	55	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
9	LAKI-LAKI	54	S1	ASN / TNI / POLRI	3	4	3	3	4	3	3	4	3
10	PEREMPUAN	48	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	4	3	4	4	4	4	3	4
11	PEREMPUAN	57	S1	ASN / TNI / POLRI	4	3	3	4	3	4	4	4	3
12	PEREMPUAN	43	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
13	LAKI-LAKI	17	SLTA KEBAWA H	PELAJAR / MAHASISWA	4	3	3	3	4	3	4	3	4
14	PEREMPUAN	17	SLTA KEBAWA H	PELAJAR / MAHASISWA	4	3	3	3	3	3	4	3	3
15	LAKI-LAKI	42	D3	ASN / TNI / POLRI	3	4	3	4	3	4	3	4	3
16	LAKI-LAKI	49	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
17	LAKI-LAKI	50	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	LAKI-LAKI	55	SLTA KEBAWA H	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
19	LAKI-LAKI	49	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
20	LAKI-LAKI	44	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
21	LAKI-LAKI	36	D3	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
22	LAKI-LAKI	48	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	3	3	3	4	3
23	PEREMPUAN	55	S1	ASN / TNI / POLRI	3	4	4	4	4	3	3	4	4
24	LAKI-LAKI	50	S1	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	PEREMPUAN	58	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3

No	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
26	LAKI-LAKI	41	S1	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
27	PEREMPUAN	57	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	3	4	4	3	3	3	3	4
28	LAKI-LAKI	42	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	3	3	3	4	3
29	LAKI-LAKI	48	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
30	PEREMPUAN	49	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
31	LAKI-LAKI	52	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
32	LAKI-LAKI	55	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	PEREMPUAN	55	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	3		3	3	3	3	4	3
34	LAKI-LAKI	44	S1	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
35	PEREMPUAN	39	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
36	LAKI-LAKI	39	D3	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
37	PEREMPUAN	43	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
38	PEREMPUAN	49	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	3	3
39	PEREMPUAN	44	S1	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
40	PEREMPUAN	47	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
41	PEREMPUAN	59	SLTA KEBAWA H	WIRASWASTA	4	4	3	4	4	4	4	3	4
42	LAKI-LAKI	17	SLTA KEBAWA H	Siswa	3	4	3	3	3	4	4	3	3
43	LAKI-LAKI	55	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	3	3	4	4
44	LAKI-LAKI	40	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	3	3	3	4	3
45	PEREMPUAN	32	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
46	LAKI-LAKI	54	SLTA KEBAWA H	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
47	LAKI-LAKI	37	D3	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	3	3	3	4	3
48	PEREMPUAN	44	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
49	LAKI-LAKI	41	S1	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
50	PEREMPUAN	39	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
51	PEREMPUAN	30	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	4	3	3	4	3	4	3
52	PEREMPUAN	43	S1	ASN / TNI / POLRI	3	4	3	3	4	4	3	4	3
53	PEREMPUAN	56	S1	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4

No	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
54	LAKI-LAKI	31	D3	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
55	LAKI-LAKI	34	S1	Serabutan	3	3	3	3	3	3	3	4	3
56	LAKI-LAKI	32	S1	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
57	LAKI-LAKI	47	S1	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
58	LAKI-LAKI	54	S1	ASN / TNI / POLRI	4	3	4	4	4	4	4	4	3
59	PEREMPUAN	56	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
60	LAKI-LAKI	49	S2	ASN / TNI / POLRI KEATAS	3	3	3	3	3	3	3	4	3
61	PEREMPUAN	28	S1	honorer	4	4	3	4	3	3	4	4	4
62	LAKI-LAKI	54	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	4	3	4	4	4	4	3
63	PEREMPUAN	31	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
64	PEREMPUAN	48	SLTA KEBAWAHA	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
65	PEREMPUAN	38	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
66	PEREMPUAN	49	SLTA KEBAWAHA	PPPK	3	3	3	3	3	3	3	4	3
67	PEREMPUAN	46	SLTA KEBAWAHA	PPPK	3	3	3	3	3	3	3	3	3
68	LAKI-LAKI	57	SLTA KEBAWAHA	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
69	LAKI-LAKI	45	S1	ASN / TNI / POLRI	4	4	3	4	3	3	3	4	3
70	LAKI-LAKI	41	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
71	PEREMPUAN	57	S2	ASN / TNI / POLRI KEATAS	4	4	4	4	4	4	4	3	4
72	LAKI-LAKI	46	D3	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
73	LAKI-LAKI	56	SLTA KEBAWAHA	ASN / TNI / POLRI	3	3	4	3	3	3	4	4	4
74	PEREMPUAN	36	SLTA KEBAWAHA	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
75	LAKI-LAKI	33	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
76	PEREMPUAN	34	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
77	PEREMPUAN	56	SLTA KEBAWAHA	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
78	LAKI-LAKI	48	SLTA KEBAWAHA	ASN / TNI / POLRI	4	3	4	4	4	4	4	4	3
79	LAKI-LAKI	50	SLTA KEBAWAHA	ASN / TNI / POLRI	4	3	3	4	4	4	4	4	3
80	LAKI-LAKI	45	SLTA KEBAWAHA	ASN / TNI / POLRI	3	4	3	4	3	3	4	4	4
81	LAKI-LAKI	39	SLTA KEBAWAHA	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	3	3	3	4	3

No	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
82	PEREMPUAN	57	SLTA KEBAWA H	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	3	3	3	4	3
83	LAKI-LAKI	39	S1	KARYAWAN SWASTA	3	3	3	3	3	3	3	4	3
84	LAKI-LAKI	56	SLTA KEBAWA H	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	LAKI-LAKI	52	SLTA KEBAWA H	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	3	3	3	4	3
86	LAKI-LAKI	38	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	4	4	4	3	4	4	4
87	PEREMPUAN	32	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	3	3	3	4	3
88	LAKI-LAKI	49	SLTA KEBAWA H	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	3	3	3	3	3
89	LAKI-LAKI	42	SLTA KEBAWA H	Seniman	3	3	3	4	3	3	3	4	3
90	PEREMPUAN	50	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	3	3	3	4	3
91	LAKI-LAKI	47	S1	KARYAWAN SWASTA	4	4	3	4	4	4	4	4	4
92	PEREMPUAN	46	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	3	3	4	4	4
93	LAKI-LAKI	59	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	3	3	3	3	4	3
94	PEREMPUAN	36	S1	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	3	3	3	3	3
95	LAKI-LAKI	52	S1	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
96	LAKI-LAKI	41	SLTA KEBAWA H	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	4	3	3	4	3
97	PEREMPUAN	56	S2 KEATAS	ASN / TNI / POLRI	3	3	3	4	3	3	3	4	3
98	LAKI-LAKI	45	SLTA KEBAWA H	ASN / TNI / POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	LAKI-LAKI	56	SLTA KEBAWA H	WIRASWASTA	3	3	3	4	3	3	3	4	4
100	LAKI-LAKI	21	S1	PELAJAR / MAHASISWA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nilai Rata-Rata					3,36	3,37	3,34	3,56	3,38	3,33	3,36	3,75	3,34
Nilai Rata-Rata Tertimbang					0,37	0,37	0,37	0,40	0,38	0,37	0,37	0,42	0,37
SKM Unit Pelayanan							**)						
							85,5						

NRR PER UNSUR

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	MUTU
U1	Persyaratan	3,36	BAIK
U2	Prosedur	3,37	BAIK
U3	Waktu Pelayanan	3,34	BAIK
U4	Biaya/Tarif	3,56	BAIK
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,38	BAIK
U6	Kompetensi Pelaksana	3,33	BAIK
U7	Perilaku Pelaksana	3,36	BAIK
U8	Penanganan Pengaduan,Saran,Masukan.	3,75	BAIK
U9	Sarana dan Prasarana.	3,34	BAIK



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan.Urip Sumohardjo No.49 Purworejo Telp.(0275) 321629  
Faximile :325546 Laman:[www.bappedalitbang.purworejokab.go.id](http://www.bappedalitbang.purworejokab.go.id),  
pos-el: [bappedalitbang@purworejokab.go.id](mailto:bappedalitbang@purworejokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN**  
**INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**NOMOR: 100.3.3/22.1/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**KABUPATEN PURWOREJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025, perlu dilakukan penilaian melalui survei kepuasan masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan survei kepuasan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat;
  - b. melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Survei;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tahun 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada Tanggal,03 Februari 2025

Kepala Bapperida  
Kabupaten Purworejo

  
Drs. Hery Raharjo, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196912251990011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET  
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN  
PURWOREJO

NOMOR: 100.3.3/22.1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SURVEI  
KEPUASAN MASYARAKAT BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN  
INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTA TIM PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bapperida	Kepala Bapperida	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris - Bapperida	Sekretaris - Bapperida	Ketua
3.	Kepala Bidang Riset Dan Inovasi - Bapperida	Kepala Bidang Riset Dan Inovasi - Bapperida	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia - Bapperida	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia - Bapperida	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah - Bapperida	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah - Bapperida	Anggota
6.	Plt .Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (Sda), Infrastruktur Dan Kewilayahan - Bapperida	Plt .Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (Sda), Infrastruktur Dan Kewilayahan - Bapperida	Anggota
7.	Ramlah Batalipu, S.H., M.M.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
8.	Yuni Ermawati, S.PT., M.P.	Perencana Ahli Muda	Anggota
9.	Marina Safariana, S.IP.	Perencana Ahli Muda	Anggota
10.	Haryadi, S.PT.	Perencana Ahli Muda	Anggota
11.	Yani Amu, STP, M.SI.	Analisis Pengembangan Wilayah	Anggota
12.	Fitria Sekar Endah, S.T.	Perencana Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Muni Rahayu Sutarni, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
14.	Liliya Agustin	Pengadministrasi Umum	Anggota
15.	Wakhid Hasyim	Pengadministrasi Umum	Anggota
16.	Edy Sisuyunianto	Pengadministrasi Umum	Anggota
17.	Rina Wulandari, S.T., M.URP.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
18.	Aufa Nailulmuna, S.T.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
19.	Aini Rahmah, S.T.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
20.	Yusrina Racmawati, S.T.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
21.	Dina Arifia, S.T.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
22.	Fikri Intizhar Rahmatullah, S.SI.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
23.	Muhamad Faisol Reza, A.MD.	Pranata Komputer Mahir	Anggota
24.	Muji Turut Handoyo, A.MD.	Pranata Komputer Mahir	Anggota
25.	Agus Widodo	Pengadministrasi Umum	Anggota
26.	Pawitrasari Putri Andayani, A.MD.	Pranata Komputer Terampil	Anggota
27.	Hasan Ma`Mun, A.MD.	Pranata Komputer Terampil	Anggota
28.	Unggul Pratisto	Petugas Keamanan	Anggota
29.	Sediyono	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
30.	Mulyono Hadi Pranoto	Pengadministrasi Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Purworejo

Pada Tanggal,03 Februari 2025

Kepala Bapperida  
Kabupaten Purworejo

  
Drs. Hery Raharjo, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196912251990011001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Urip Sumohardjo Nomor 64 Purworejo Jawa Tengah 54111,  
Telepon (0275) 321629, Faksimile (275) 325546  
Laman bapperida.purworejakab.go.id, Pos-el: bapperida@purworejakab.go.id

Purworejo, 3 Februari 2026


Yth. Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan  
di  
Purworejo



SURAT PENGANTAR  
Nomor : 900 / 174 / 2026

No.	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Bulanan Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan s.d Bulan Januari 2026 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo, dengan: Realisasi Keuangan: Rp279.766.117,00 Persentase Keuangan: 4,10% Target Fisik : 4,34% Realisasi Fisik : 5,42%	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa

Diterima tanggal .....  
Penerima

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan Inovasi  
Daerah Kabupaten Purworejo

  
Drs. Hery Raharjo, M.Si  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 196912251990011001

PARAF HIERARKI	
Plt. Sekretaris	
Kasubag Umum dan Kepegawaian	

## LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN

S/D BULAN JANUARI 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi				Deviasi Fisik (%)	KET	
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						Fisik %
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.596.165.618	355.262.000			4.951.427.618					4.949.542.818	1.884.800	5,24	251.886.315	19.134.802	271.021.117	5,47	6,27	1,03	
1	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.242.200				27.242.200					27.242.200	0	0,00		2.420.000	2.420.000	8,88	8,89	8,89	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.691.200				19.691.200					19.691.200	0	0,00		2.420.000	2.420.000	12,29	12,29	12,29	
1		Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (9.25)	1.820.800				1.820.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	1.820.800	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2		Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (88.25)	17.378.400				17.378.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	17.378.400	0	0,00		2.420.000	2.420.000	13,93	13,93	13,93	
3		Pelaporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2.50)	492.000				492.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	492.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.876.800				1.876.800					1.876.800	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
1		Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100.00)	1.876.800				1.876.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	1.876.800	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.674.200				5.674.200					5.674.200	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
1		Persiapan Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (15.10)	856.600				856.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	856.600	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2		Pelaksanaan Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (84.90)	4.817.600				4.817.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	4.817.600	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.855.801.338				3.855.801.338					3.853.916.538	1.884.800	6,66	240.322.766		240.322.766	6,23	7,14	0,48	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi				Deviasi Fisik (%)	KET	
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						Fisik %
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.853.916.538				3.853.916.538					3.853.916.538	0	6,66	240.322.766		240.322.766	6,24	7,14	0,48	
1		Gaji dan Tunjangan ASN (100,00)	3.853.916.538				3.853.916.538	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	3.853.916.538	0	6,66	240.322.766		240.322.766	6,24	7,14	0,48	
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.884.800				1.884.800							0,00			0	0,00	0,00	0,00	
1		Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (100,00)	1.884.800				1.884.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		1.884.800	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
3	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.028.200				4.028.200					4.028.200	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.028.200				4.028.200					4.028.200	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
1		Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan IEPK (100,00)	4.028.200				4.028.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	4.028.200	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
4	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.795.800				183.795.800					183.795.800	0	1,63	6.356.244	5.300.000	11.656.244	6,34	7,54	5,91	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.160.200				5.160.200					5.160.200	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
1		Penyediaan Alat Listrik (100,00)	5.160.200				5.160.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	5.160.200	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.453.100				1.453.100					1.453.100	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
1		Penyediaan Alat Rumah Tangga dan Kebersihan (100,00)	1.453.100				1.453.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	1.453.100	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.220.000				38.220.000					38.220.000	0	0,00			0	0,00	5,00	5,00	
1		Penyediaan Minum Harian Pegawai (100,00)	38.220.000				38.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	38.220.000	0	0,00			0	0,00	5,00	5,00	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan	6.770.800				6.770.800					6.770.800	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>Pengadaan</b>																			
1		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan (100.00)	6.770.800				6.770.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2026	6.770.800	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.530.400				12.530.400					12.530.400	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
1		Penyediaan ATK (100.00)	12.530.400				12.530.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2026	12.530.400	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.975.000				3.975.000					3.975.000	0	0,00		1.325.000	1.325.000	33,33	33,33	33,33	
1		Fasilitas Tamu Bapperinda (100.00)	3.975.000				3.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2026	3.975.000	0	0,00		1.325.000	1.325.000	33,33	33,33	33,33	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.818.600				108.818.600					108.818.600	0	2,76	6.356.244	3.975.000	10.331.244	9,49	9,76	7,00	
1		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bapperkia (12.69)	13.813.600				13.813.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2026	13.813.600	0	0,00		3.975.000	3.975.000	28,78	28,78	28,78	
2		Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD (87.31)	95.005.000				95.005.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2026	95.005.000	0	3,16	6.356.244		6.356.244	6,69	7,00	3,84	
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.867.700				6.867.700					6.867.700	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
1		Pelaksanaan Penatausahaan Arsip (100.00)	6.867.700				6.867.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2026	6.867.700	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
5	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		355.262.000			355.262.000					355.262.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.262.000			9.262.000					9.262.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
1		Pengadaan Tablet (100.00)		9.262.000			9.262.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2026	9.262.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		346.000.000			346.000.000					346.000.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		Pembangunan Pagar Gedung Kantor (100.00)		346.000.000			346.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026	346.000.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
6	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.764.080				173.764.080					173.764.080	0	0,00	5.207.305	9.519.302	14.726.607	8,48	8,48	8,48	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.692.080				110.692.080					110.692.080	0	0,00		9.519.302	9.519.302	8,60	8,60	8,60	
1		Penyediaan Air, Listrik, dan Telepon (100.00)	110.692.080				110.692.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026	110.692.080	0	0,00		9.519.302	9.519.302	8,60	8,60	8,60	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.072.000				63.072.000					63.072.000	0	0,00	5.207.305		5.207.305	8,26	8,26	8,26	
1		Penyediaan Jasa Tenaga Paruh Waktu (100.00)	63.072.000				63.072.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026	63.072.000	0	0,00	5.207.305		5.207.305	8,26	8,26	8,26	
7	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.534.000				351.534.000					351.534.000	0	0,00		1.895.500	1.895.500	0,54	1,28	1,28	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000				39.950.000					39.950.000	0	0,00			0	0,00	5,00	5,00	
1		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (100.00)	39.950.000				39.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026	39.950.000	0	0,00			0	0,00	5,00	5,00	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.140.000				144.140.000					144.140.000	0	0,00		1.550.500	1.550.500	1,08	1,50	1,50	
1		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (100.00)	144.140.000				144.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026	144.140.000	0	0,00		1.550.500	1.550.500	1,08	1,50	1,50	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.810.000				37.810.000					37.810.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		Pemeliharaan Printer (40.15)	15.180.000				15.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	15.180.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2		Pemeliharaan Laptop (59.85)	22.630.000				22.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	22.630.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	<b>5.01.01.2.09.0009</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>109.163.000</b>				<b>109.163.000</b>					<b>109.163.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	
1		Pemeliharaan Gedung Kantor Baperpda (100.00)	109.163.000				109.163.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	109.163.000	0	0,00		345.000	345.000	0,32	0,32	0,32	
	<b>5.01.01.2.09.0010</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>20.471.000</b>				<b>20.471.000</b>					<b>20.471.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (100.00)	20.471.000				20.471.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	20.471.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>528.049.200</b>				<b>528.049.200</b>							<b>5,05</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>	<b>1,37</b>	
<b>8</b>	<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>317.132.000</b>				<b>317.132.000</b>							<b>7,95</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10,24</b>	<b>2,28</b>	
	<b>5.01.02.2.01.0001</b>	<b>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</b>	<b>71.650.000</b>				<b>71.650.000</b>							<b>35,20</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37,60</b>	<b>2,40</b>	
1		Rancangan Awal RKPd 2027 (40.00)	14.106.100				14.106.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		- s/d -		14.106.100	13,00			0	0,00	19,00	6,00	
2		Forum Konsultasi Publik RKPd 2027 (30.00)	24.554.700				24.554.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		- s/d -		24.554.700	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
3		Rancangan Awal RKPd 2028 (30.00)	32.989.200				32.989.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		- s/d -		32.989.200	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	<b>5.01.02.2.01.0007</b>	<b>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen</b>	<b>245.482.000</b>				<b>245.482.000</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			
1		Musrenbang Kecamatan RKPD 2027 (15.00)	17.587.500				17.587.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		- s/d -		17.587.500	0,00			0	0,00	11,00	11,00	
2		Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Tahun 2027 (15.00)	24.263.500				24.263.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		- s/d -		24.263.500	0,00			0	0,00	4,00	4,00	
3		Koordinasi Penyusunan Manajemen Risiko Pemda Tahun 2027 (15.00)	33.826.400				33.826.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		- s/d -		33.826.400	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
4		Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2027 (15.00)	35.286.600				35.286.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		- s/d -		35.286.600	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
5		Koordinasi dan Konsultasi Penelaahan Dokumen Perencanaan (15.00)	55.130.000				55.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		- s/d -		55.130.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
6		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Perbub RKPD 2027 dan Perubahan RKPD 2026 (25.00)	79.388.000				79.388.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		- s/d -		79.388.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
9	5.01.02.2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>67.809.800</b>				<b>67.809.800</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	5.01.02.2.02.0001	<b>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>23.704.700</b>				<b>23.704.700</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Persiapan Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (5.00)	1.737.300				1.737.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026		1.737.300	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2		Penyusunan Profil Pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (25.00)	4.857.200				4.857.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026		4.857.200	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
3		Penyusunan Dokumen Analisis Data (40.00)	11.503.000				11.503.000	Dana Transfer Umum-Dana	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026		11.503.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.263.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.900</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KEY
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Alokasi Umum													
4		Penyusunan Dokumen Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (25.00)	4.330.000				4.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		4.330.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
5		Penyusunan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (5.00)	1.277.200				1.277.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		1.277.200	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
		<b>5.01.02.2.02.0002</b>	<b>44.105.100</b>				<b>44.105.100</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1		Persiapan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (5.00)	1.330.600				1.330.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		1.330.600	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2		Forum Satu Data Semester I 2026 (25.00)	16.715.000				16.715.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		16.715.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
3		Forum Satu Data Semester II 2026 (25.00)	16.715.000				16.715.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		16.715.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
4		Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Purworejo (20.00)	1.919.400				1.919.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		1.919.400	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
5		Koordinasi Internal dan Eksternal Pembinaan dan Pemanfaatan Data (20.00)	6.845.000				6.845.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		6.845.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
6		Penyusunan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (5.00)	580.100				580.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		580.100	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
10		<b>5.01.02.2.03</b>	<b>143.107.400</b>				<b>143.107.400</b>							<b>1,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>						<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	143.107.400				143.107.400							1,00			0	0,00	1,00	0,00	
1		Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (5.00)	2.337.000				2.337.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		2.337.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2		Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD (10.00)	1.820.400				1.820.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		1.820.400	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
3		Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal (10.00)	12.762.000				12.762.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		12.762.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
4		Pelaksanaan evaluasi RTP Manajemen Risiko Pemerintah Daerah (10.00)	13.041.600				13.041.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		13.041.600	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
5		Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah (10.00)	23.016.400				23.016.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		23.016.400	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
6		Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD (20.00)	33.341.600				33.341.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		33.341.600	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
7		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sawji (20.00)	56.490.000				56.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		56.490.000	5,00			0	0,00	5,00	0,00	
8		Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RKPD serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD (10.00)	298.400				298.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		298.400	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
9		Penyusunan laporan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	539.624.700				539.624.700					445.699.700	93.925.000	1,75	8.745.000		8.745.000	1,62	4,57	2,82	
		Jumlah	6.461.795.718	355.262.000			6.817.057.718					5.395.242.518	95.809.800	4,34	260.631.315	19.134.802	279.766.117	4,10	5,42	1,08	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	269.778.500				269.778.500					269.778.500	0	3,50	8.745.000		8.745.000	3,24	6,26	2,75	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	67.806.200				67.806.200					67.806.200	0	5,00	5.830.000		5.830.000	8,60	9,25	4,25	
1		Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (5.00)	5.266.400				5.266.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	5.266.400	0	100,00			0	0,00	50,00	-50,00	
2		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (45.00)	39.865.000				39.865.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	39.865.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
3		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (45.00)	21.200.000				21.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	21.200.000	0	0,00	5.830.000		5.830.000	27,50	15,00	15,00	
4		Pelaporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (5.00)	1.474.800				1.474.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	1.474.800	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	201.972.300				201.972.300					201.972.300	0	3,00	2.915.000		2.915.000	1,44	5,25	2,25	
1		Persiapan (3.00)	5.351.500				5.351.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	5.351.500	0	100,00			0	0,00	50,00	-50,00	
2		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (25.00)	147.224.000				147.224.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	147.224.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
3		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (25.00)	21.200.000				21.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	21.200.000	0	0,00	2.915.000		2.915.000	13,75	15,00	15,00	
4		Pelaksanaan Koordinasi Percepatan Penganggulangan Kemiskinan (10.00)	7.950.000				7.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	7.950.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5		Pelaksanaan Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (10.00)	7.950.000				7.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	7.950.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
6		Pelaksanaan Koordinasi Pengarusutamaan Gender (10.00)	2.650.000				2.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	2.650.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
7		Pelaksanaan Koordinasi Kabupaten Layak Anak (5.00)	2.650.000				2.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	2.650.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
8		Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (5.00)	2.650.000				2.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2026	2.650.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
9		Pelaksanaan Koordinasi Kabupaten Sehat (5.00)	2.650.000				2.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	2.650.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
10		Pelaporan (2.00)	1.696.800				1.696.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	1.696.800	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
12	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	112.601.000				112.601.000					18.676.000	93.925.000	0,00			0	0,00	6,70	6,70	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	67.755.400				67.755.400					18.676.000	49.079.400	0,00			0	0,00	6,50	6,50	
1		Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (5.00)	1.513.800				1.513.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		1.513.800	0,00			0	0,00	10,00	10,00	
2		Asistensi Penyusunan Dokrenbang Peringkat Daerah Bidang Perekonomian (30.00)	4.240.000				4.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		4.240.000	0,00			0	0,00	10,00	10,00	
3		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (45.00)	43.325.600				43.325.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		43.325.600	0,00			0	0,00	5,00	5,00	
<b>Jumlah</b>			<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4	Forum T2SLP (15.00)	18.676.000				18.676.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	18.676.000	0	0,00			0	0,00	5,00	5,00	
	5	Penyusunan laporan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	<b>5.01.03.2.02.0008</b>	<b>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</b>	<b>44.845.600</b>				<b>44.845.600</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	
	1	Asistensi Penyusunan Dokrenbang Perangkat Daerah Bidang SDA (40.00)	8.780.000				8.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		- s/d -		8.780.000	0,00			0	0,00	10,00	10,00	
	1	Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (5.00)	1.915.600				1.915.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		1.915.600	0,00			0	0,00	10,00	10,00	
	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (50.00)	34.150.000				34.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		34.150.000	0,00			0	0,00	5,00	5,00	
	4	Penyusunan laporan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	<b>13</b>	<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>157.245.200</b>			<b>157.245.200</b>					<b>157.245.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	
		<b>5.01.03.2.03.0004</b>	<b>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</b>	<b>96.780.200</b>			<b>96.780.200</b>					<b>96.780.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	
	1	Persiapan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (5.00)	821.800				821.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	821.800	0	0,00			0	0,00	5,00	5,00	
	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (50.00)	78.158.400				78.158.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026	78.158.400	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (40.00)	17.800.000				17.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026	17.800.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
4		Pelaporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	<b>5.01.03.2.03.0008</b>	<b>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</b>	<b>60.465.000</b>				<b>60.465.000</b>					<b>60.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Persiapan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (5.00)	958.000				958.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026	958.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (50.00)	2.500.000				2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026	2.500.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
3		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPPD, RPJMD, dan RKP) (40.00)	57.007.000				57.007.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026	57.007.000	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
4		Pelaporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	<b>5.05.03</b>	<b>PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</b>	<b>797.956.200</b>				<b>797.956.200</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	<b>5.05.03.2.01</b>	<b>Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan</b>	<b>543.030.200</b>				<b>543.030.200</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.05.03.2.01.0002</b>	<b>Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset</b>	<b>518.906.200</b>				<b>518.906.200</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Koordinasi konsultasi (1.00)	2.924.000				2.924.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026		2.924.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2		Analisis IDSD (3.00)	17.463.000				17.463.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026		17.463.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3		Workshop penyusunan policybrief (4.00)	21.200.000				21.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		21.200.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
4		Penerbitan Jurnal Integral (7.00)	37.582.200				37.582.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		37.582.200	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
5		Riset Unggulan Daerah (85.00)	439.737.000				439.737.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		439.737.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	<b>5.05.03.2.01.0004</b>	<b>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</b>	<b>24.124.000</b>				<b>24.124.000</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Koordinasi konsultasi FKRI propinsi (12.00)	2.924.000				2.924.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		2.924.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2		Forum Komunikasi Riset dan Inovasi Daerah (Kabupaten) (88.00)	21.200.000				21.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		21.200.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>5.05.03.2.02</b>	<b>Invensi dan Inovasi</b>	<b>254.926.000</b>				<b>254.926.000</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.05.03.2.02.0006</b>	<b>Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual</b>	<b>26.114.000</b>				<b>26.114.000</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Workshop Drafting Paten (Pendampingan penyusunan proposal Paten) (31.00)	8.100.000				8.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		8.100.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2		Rakor HKI (34.00)	8.800.000				8.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		8.800.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
3		Pendaftaran HKI (35.00)	9.214.000				9.214.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		9.214.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	<b>5.05.03.2.02.0011</b>	<b>Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik</b>	<b>16.174.000</b>				<b>16.174.000</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi				Deviasi Fisik (%)	KET	
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.																			
1		Fasilitasi hilirisasi hasil inovasi (100.00)	16.174.000				16.174.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		16.174.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	<b>5.05.03.2.02.0012</b>	<b>Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi</b>	<b>145.014.000</b>				<b>145.014.000</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Koordinasi konsultasi krenova propinsi (2.00)	2.924.000				2.924.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		2.924.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2		Sosialisasi Krenova (5.00)	7.625.000				7.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		7.625.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
3		IGA (Innovative Government Award) (8.00)	11.100.000				11.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		11.100.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
4		Seleksi Krenova Kabupaten (11.00)	15.625.000				15.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		15.625.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
5		Penyerahan Hadiah Krenova Kabupaten (31.00)	45.474.000				45.474.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		45.474.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
6		Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah (43.00)	62.266.000				62.266.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		62.266.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	<b>5.05.03.2.02.0013</b>	<b>Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah</b>	<b>44.024.000</b>				<b>44.024.000</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Koordinasi konsultasi dan Benchmarking (5.00)	2.184.000				2.184.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Des-2026		2.184.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2		Paparan Pendahuluan pengembangan rancang bangun inovasi (5.00)	2.650.000				2.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026		2.650.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
3		Uji Coba/Paparan Antara Hasil pengembangan rancang bangun inovasi (5.00)	2.650.000				2.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026		2.650.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
4		Paparan hasil pengembangan rancang bangun inovasi (12.00)	5.250.000				5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026		5.250.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
5		Pengembangan Rancang Bangun Inovasi (71.00)	31.290.000				31.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026		31.290.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
		<b>5.05.03.2.02.0018 Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan Inovasi dan inovasi</b>	<b>23.600.000</b>				<b>23.600.000</b>							<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Inkubasi (38.00)	9.000.000				9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026		9.000.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
2		Verifikasi lapangan (62.00)	14.600.000				14.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2026 s/d 31-Dec-2026		14.600.000	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>6.461.795.718</b>	<b>355.262.000</b>			<b>6.817.057.718</b>					<b>5.395.242.518</b>	<b>95.809.800</b>	<b>4,34</b>	<b>260.631.315</b>	<b>19.134.802</b>	<b>279.766.117</b>	<b>4,10</b>	<b>5,42</b>	<b>1,08</b>	

Purworejo, 3 Februari 2026  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

  
Drs. HERY RAHARJO, S.S.  
NIP. 196912251990011001

PENGHARGAAN INNOVATION GOVERNMENT AWARDS (IGA) 2025



**PENGHARGAAN INNOVATION GOVERNMENT AWARDS (IGA) 2025**



**DOKUMENTASI PENERIMAAN PENGHARGAAN**

